

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN APLIKASI EPRA (EVALUASI DAN
PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN) DALAM PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN DI KANTOR INSPEKTORAT DAERAH
KOTA MANADO**

Disusun Oleh:
Angelica F Lalendim
NIM: 21043132



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI MANADO JURUSAN AKUNTANSI

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN

TAHUN 2025

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PENERAPAN APLIKASI EPRA (EVALUASI DAN
PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN) DALAM PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN DI KANTOR INSPEKTORAT DAERAH
KOTA MANADO**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Akuntansi
Pada Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan**

Oleh:

**Angelica F Lalendim
NIM: 21043132**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Dengan Judul

**ANALISIS PENERAPAN APLIKASI EPRA (EVALUASI DAN
PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN) DALAM PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN DI KANTOR INSPEKTORAT DAERAH
KOTA MANADO**

Oleh

Nama : Angelica F Lalendim.
MM : 21043132
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan

Disetujui untuk Diujikan

Manado, 07 Juli 2025

Pembimbing 1



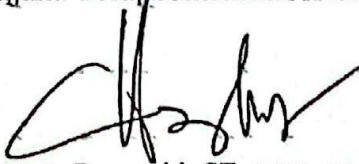
Raykes Himrich Tuerah, SE.,MSA
NIP. 19860327 201903 1014

Pembimbing 2



Belthasar Trita Siahaan, SE.,M.Si
NIP. 19920816 202203 1008

Mengetahui,
Koordinator Program Studi
Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan



Prof. Dr. Hedy Rumambi, SE.,MM.,Ak.,CA.,CSRS
NIP. 19700205 199802 2 2002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul

ANALISIS PENERAPAN APLIKASI EPRA (EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN) DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI KANTOR INSPEKTORAT DAERAH KOTA MANADO

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Tim Penguji Akhir
Pada hari Rabu, 16 – 07- 2025, pukul 09:00 – 11:00 di Jurusan Akuntansi.

Oleh:

Angelica F Lalendim
NIM: 21043132

Dan yang bersangkutan dinyatakan

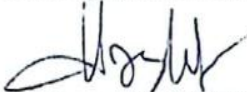
LULUS

Tim Penguji Akhir

Ketua Sidang/Penguji : Jacqualine G. Wenas, SE.,MSA
NIP. 196904072008122001
Penguji I : Fanesa I.M. Syaefudin, M.Acc
NIP. 199403152022032013
Penguji II : Deisy Lusiana, SE.,Msi
NIP. 197003052003122001

Mengetahui
JURUSAN AKUNTANSI

Koordinator Prodi
Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan


Prof. Dr. Hedy Rumambi, SE,MM.,Ak.,CA.,CSRS
NIP. 197002051998022002



Sekretaris Jurusan


Joseph Nugraha Tangon, SE.,MSA.,AK
NIP. 196610121997021001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah orisinal, merupakan hasil karya saya sendiri, Tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam tugas akhir ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustakanya.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur plagiasi, saya bersedia tugas akhir ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manado, 16 Juli 2025

Penulis



Angelica F. Lalendim
Nim. 21043132

ABSTRAK

Angelica F Lalendim, 2025. **Analisis Penerapan Aplikasi EPRA (Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado.** Skripsi, Prorgam Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado. Dibimbing Oleh Pembimbing I: Raykes Hinrich Tuerah, SE., MSA dan Pembimbing II: Belthasar Tritto Siahaan, SE., M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan aplikasi EPRA dalam penyusunan laporan keuangan di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado. Aplikasi EPRA merupakan sebuah sistem digital berbasis web yang dikembangkan untuk mempermudah proses pemantauan, evaluasi, dan pelaporan realisasi anggaran secara sistematis, akurat, dan transparan, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi EPRA memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan. Hal ini terlihat dari adanya kemudahan dalam akses informasi, ketepatan waktu pelaporan, serta meningkatnya akurasi dan akuntabilitas dalam pencatatan anggaran. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat optimalisasi sistem, antara lain keterbatasan kemampuan teknis sumber daya manusia serta gangguan teknis yang sesekali muncul pada sistem aplikasi.

Peneliti memberikan rekomendasi pada perusahaan untuk mencapai hasil yang lebih maksimal, diperlukan upaya peningkatan kapasitas teknis pengguna melalui pelatihan yang berkelanjutan, serta perbaikan sistem secara periodik guna mendukung kelancaran operasional aplikasi secara menyeluruh.

Kata Kunci: Analisis, Aplikasi EPRA, Laporan Keuangan.

ABSTRACT

Angelica F Lalendim, 2025. *Analysis of the Implementation Oof the EPRA Application (Evaluation and Supervision of Budget Realization) in the Preparation of Financial Reports at the Regional Inspectorate Office of Manado City*. Thesis, Applied Undergraduate Study Program in Financial Accounting, Department of Accounting, Manado State Polytechnic. Guided by Supervisor I: Raykes Hincrich Tuerah, SE., MSA and Supervisor II: Belthasar Trito Siahaan, SE., M.Si.

This study aims to examine how the EPRA application is implemented in the preparation of financial reports at the Regional Inspectorate Office of Manado City. EPRA is a web-based digital system developed to facilitate the monitoring, evaluation, and reporting of budget realization in a systematic, accurate, and transparent manner, particularly in the preparation of local government financial statements.

The research was conducted at the Regional Inspectorate Office of Manado City using a descriptive qualitative approach, with both primary and secondary data sources. Data collection techniques included interviews, observations, and documentation related to the use of the EPRA application in the financial reporting process.

The results of the study indicate that the implementation of the EPRA application has had a significant impact on improving the quality of financial reporting. This is evidenced by easier access to information, improved timeliness of reporting, and enhanced accuracy and accountability in budget recording. However, several challenges still hinder system optimization, such as limited technical skills among staff and occasional technical disruptions in the application.

The researcher recommends that to achieve more optimal results, efforts should be made to enhance users technical capacity through ongoing training, as well as conduct regular system maintenance and upgrades to support the smooth operation of the application.

Keywords: Analysis, EPRA Application, Financial Reports.

RIWAYAT HIDUP



Nama : Angelica F. Lalendim
Nim : 21042132
Tempat Lahir : Talaud, Ammat
Tanggal Lahir : 04 November 2001

Nama Orang Tua
Ayah : Frets Lalendim
Ibu : Juswin Lamansiang

Riwayat Pendidikan
TK : TK Tunas Harapan Ammat (2007-2008)
SD : SDN 1 Tampan' Amma (2008-2014)
SMP : SMP Negeri 4 Rainis Di Dapalan (2014-2017)
SMA : SMA Negeri 1 Melonguane (2017-2020)
PERGURUAN TINGGI : Politeknik Negeri Manado (2021-2025)

Email : angelicalamansiang@gmail.com
No. Telepon : 085353991116

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Kesuksesan bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan.”

“Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia”.

(Kolose 3:23)

“Karena Masa Depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”.

(Amsal 23:18)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kasih dan syukur, karya ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, Sang sumber kehidupan dan pengharapan. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang nyata dalam setiap proses yang kulalui. Di saat aku lelah, Engkau memberikan kekuatan. Di saat aku ragu, Engkau menuntun. Semua ini terjadi semata-mata karena kasih dan anugerah-Mu yang tak berkesudahan.
2. Untuk diriku sendiri, yang telah berjuang tanpa lelah. Terima kasih telah tetap kuat meski sempat ingin menyerah. Perjalanan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi aku bangga telah melaluinya. Persembahan ini adalah bentuk penghargaan atas setiap luka, air mata, dan senyuman yang telah dilewati dengan penuh harapan.
3. Kedua orang tua tercinta, Bapak Frets Lalendim dan Ibu Juswin Lamansiag, pahlawan tanpa tanda jasa dalam hidupku. Terima kasih atas kasih sayang, doa, kerja keras, dan pengorbanan yang tak pernah berhenti diberikan. Setiap keberhasilanku adalah cerminan dari cinta kalian yang tulus dan tanpa syarat.
4. Saudara-saudaraku kandung, Aris Lalendim, Altrivi Lalendim, dan Ripan Lamansiag, yang senantiasa memberi semangat dan menjadi tempatku bersandar dalam suka dan duka. Doa dan dukungan kalian menjadi cahaya dalam setiap langkahku. Semoga keberhasilanku hari ini dapat menjadi kebanggaan bagi kita semua.

5. Untuk dia yang spesial, Meylben Frenley Ruung, terima kasih atas cinta dan kesabaranmu yang luar biasa. Dukungan dan kehadiranmu menjadi kekuatan tersendiri yang tidak tergantikan sepanjang perjuangan ini.
6. Keponakan-keponakan tersayang, Kesya Lamansiang, Aisyha Lalendim, Tiara Lamansiang, Helvia Tindige, dan Marcelo Lalendim Lamansiang. Kalian adalah alasan aku terus melangkah dan ingin menjadi contoh yang baik. Semoga keberhasilanku hari ini dapat menjadi inspirasi bahwa impian bisa tercapai dengan doa, usaha, dan ketekunan.
7. Seluruh keluarga yang telah menjadi sumber kekuatan dan semangat, serta yang telah membantu penulis dari awal masuk perkuliahan di Politeknik Negeri Manado.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis Panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, atas segala rahmat, pemyertaan dan kekuatan yang senantiasa diberikan hingga skripsi yang berjudul: **“Analisis Penerapan Aplikasi EPRA (Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado”** dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi di Politeknik Negeri Manado.

Pada kesempatan ini, penulis berkerinduan menyampaikan rasa terimakasih yang tulus dan mendalam kepada :

1. Dra. Maryke Alelo, MBA selaku Direktur Politeknik Negeri Manado.
2. Dr. Diane Tangian, SH., M.Si selaku Wakil Direktur Bidang Akademik.
3. Selvy Kalele, SE., MSi selaku wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
4. Rudolf Estephanus Golioth Mait, ST., MT selaku Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
5. Juliet P.T. Makinggung, SE., M.Si selaku Wakil Direktur Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
6. Raymond Festus Rombot, SE., Msi selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
7. Joseph Nugraha Tangon, SE., MSA., AK selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
8. Prof. Dr. Hedy D. Rumambi, SE., Ak., MM, CA., CSRS selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan.
9. Alpindos Toweula, SE., MM., Ak., CA., BKP selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan.
10. Merry Ligia Sael, SE., M.Si selaku Koordinator Program Studi Diploma III Akuntansi.
11. Johanes H. Tene, SE., MSA., AK., CA., BKP selaku Kepala Laboratorium Akuntansi Keuangan.
12. Esrie A. N. Limpeleh, SE., MM selaku Kepala Laboratorium Aplikasi Pengolahan Data.
13. Jacqualine G. Wenas, SE., MSA selaku Kepala Labaratorium Sistem Informasi Akuntansi.

14. Dr. Ivonne H. Putong, SE., AK., M., Ak., CA selaku Kepala Laboratorium Pajak.
 15. Antonius A. Tandi, SE., M.Si., Ak., CA selaku Kepala TUK Akuntansi.
 16. Dra. Revleen M. Kaparang, M.Pd selaku Ketua Panitia Magang.
 17. Raykes H. Tuerah, SE., MSA selaku Dosen Pembimbing 1.
 18. Belthasar T. Siahaan, SE., Msi selaku Dosen Pembimbing 2.
 19. Jacqualine G. Wenas, SE., MSA selaku Dosen Ketua Penguji.
 20. Fanesa I.M. Syaefudin, M.Acc selaku Dosen Penguji 1.
 21. Deisy Lusiana, SE., M.Si selaku Dosen Penguji 2.
 22. Jeane Ch. Lasut, SH., MH selaku Dosen Wali.
 23. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Jurusan Akuntansi.
 24. Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melaksanakan kuliah magang, serta data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian.
 25. Teman-teman seperjuangan grup WIB Sonya Aula, Adevia Ruung, Alan Lomban dan Riandi Ruung yang saling membantu dalam kondisi apapun dan selalu siap mendengarkan curhatan penulis. Penulis mau berterima kasih khususnya kepada sahabat penulis yaitu, Sonya Aulakarena sudah sempatkan membantu penulis dsism pembuatan proposal skripsi.
 26. Rekan-rekan seperjuangan kelas C angkatan 21.
 27. Semua pihak yang sudah membantu dan memberikan semangat kepada penulis selama dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.
- Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Manado, 16 Juli 2025

Angelica F. Lalendim
NIM. 21043132

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).....	7
2.1.1 Pengertian LKPD	7
2.1.2 Tujuan LKPD	7
2.1.3 Jenis-jenis LKPD.....	8
2.2 Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah.....	18
2.2.1 Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah	19
2.2.2 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah	20
2.2.3 Prosedur Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah melalui Aplikasi EPRA.....	20
2.3 Aplikasi EPRA	23
2.3.1 Peran Aplikasi EPRA dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.....	24
2.3.2 Peran Pihak yang Terlibat di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado	24

2.3.3 Dampak Terhadap Akuntabilitas Keuangan	26
2.4 Penelitian Terdahulu	27
2.5 Kerangka Berpikir Penelitian	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	33
3.3 Sumber Data	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data	34
3.5 Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Gambaran Umum Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado.....	37
4.1.1 Sejarah Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado	37
4.1.2 Visi & Misi Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado	39
4.1.3 Struktur Organisasi Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado	42
4.1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	42
4.2 Hasil Penelitian.....	44
4.2.1 Proses Login ke Sistem Aplikasi EPRA	45
4.2.2 Penginputan Data Pagu Anggaran.....	46
4.2.3 Pengisian Realisasi Fisik dan Keuangan	46
4.2.4 Target Fisik dan Keuangan	47
4.2.5 Pengisian Rencana Realisasi Anggaran Kas (RAK)	48
4.2.6 Verifikasi dan Validasi Data	48
4.2.7 Monitoring dan Evaluasi.....	49
4.2.8 Penyusunan dan Pencetakan Laporan Keuangan.....	49
4.2.9 Evaluasi Penggunaan Aplikasi EPRA	50
4.3 Pembahasan	52
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	57
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Rekomendasi	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Format Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	9
Tabel 2. 2 Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).....	10
Tabel 2. 3 Format Neraca	11
Tabel 2. 4 Format Laporan Operasional (LO).....	12
Tabel 2. 5 Format Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	13
Tabel 2. 6 Format Laporan Arus Kas (LAK)	14
Tabel 2. 7 Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 4. 1 Laporan Keuangan yang dihasilkan Menggunakan Aplikasi EPRA.....	49
Tabel 4. 2 Aspek Evaluasi Penggunaan Sudah Sesuai.....	50
Tabel 4. 3 Aspek Evaluasi Penggunaan Belum Sesuai.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Flowchat Prosedur Pelaporan Keuangan Aplikasi EPRA.....	22
Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir.....	32
Gambar 4. 1 Gedung Inspektorat Daerah Kota Manado	37
Gambar 4. 2 Visi & Misi.....	39
Gambar 4. 3 Struktur Organisasi	42
Gambar 4. 4 Proses Login ke Sistem Aplikasi EPRA	45
Gambar 4. 5 Data Pagu Anggaran	46
Gambar 4. 6 Realisasi Fisik dan Keuangan.....	47
Gambar 4. 7 Target Fisik dan Keuangan	47
Gambar 4. 8 Rencana Realisasi Anggaran Kas (RAK)	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara.....	61
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	63
Lampiran 3 Surat Balasan Permohonan Data.....	64
Lampiran 4 Surat Keterangan Cek Plagiarisme	65
Lampiran 5 Lembar Asistensi Revisi - Ketua Penguji.....	66
Lampiran 6 Lembar Asistensi Revisi - Penguji 1	67
Lampiran 7 Lembar Asistensi Revisi - Penguji 2	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal yang bertanggung jawab langsung terhadap pembangunan daerah, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam melaksanakan fungsinya, pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mencakup transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan tersebut adalah dengan menyusun laporan keuangan yang komprehensif dan dapat dipercaya. Pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya dan keuangannya sendiri guna menunjang pembangunan daerah dan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam menjalankan tugas tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk menunjukkan kinerja yang transparan dan bertanggung jawab, terutama dalam hal pengelolaan anggaran. Dengan meningkatnya kompleksitas pengelolaan keuangan publik, maka dibutuhkan sistem yang mampu mendukung efektivitas pengawasan dan pelaporan keuangan secara akurat. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan sistem informasi yang diterapkan di lingkungan pemerintah daerah, termasuk aplikasi EPRA, harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang baik. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan APBD (Alrahim & Wibowo, 2022).

Laporan keuangan memiliki peranan yang sangat strategis dalam lingkungan pemerintah daerah karena menjadi instrumen utama dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD kepada publik dan lembaga pengawas seperti DPRD dan BPK. Melalui laporan ini, pemerintah daerah menyampaikan informasi mengenai bagaimana anggaran telah dikelola, sejauh mana program dan kegiatan telah dilaksanakan, serta seberapa efektif penggunaan dana publik dalam mencapai tujuan pembangunan. Tidak hanya itu, laporan keuangan

juga menjadi dasar dalam proses audit, evaluasi kinerja keuangan, serta perencanaan anggaran di tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan yang tepat, akurat, dan tepat waktu menjadi keharusan bagi setiap entitas pemerintah daerah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Menurut (Sumanti et al., 2022), dalam praktiknya, penyusunan laporan keuangan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Permasalahan tersebut menyebabkan proses pelaporan keuangan belum sepenuhnya berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan dalam sistem pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam mengelola berbagai potensi daerah, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya keuangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dituntut untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip tersebut mencakup transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas, yang menjadi landasan penting dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang tertib, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu komponen penting dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana pelaksanaan anggaran yang telah direncanakan benar-benar terealisasi dalam suatu periode. Laporan ini menyajikan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dengan realisasi penerimaan dan belanja yang benar-benar terjadi. Dengan adanya LRA, pihak-pihak yang berkepentingan dapat melihat sejauh mana pemerintah daerah menjalankan rencana keuangannya secara efektif dan efisien. Laporan ini juga menjadi alat kontrol untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik telah sesuai dengan tujuan dan kebijakan anggaran yang telah dirancang sebelumnya. Oleh karena itu, akurasi dan ketepatan waktu dalam penyusunan LRA menjadi aspek krusial dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menjadikan LRA sebagai fokus penting dalam penelitian yang berkaitan dengan evaluasi sistem pelaporan keuangan, seperti pada penerapan aplikasi EPRA.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat, instansi pemerintahan dituntut untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah penggunaan sistem informasi keuangan berbasis digital, yang bertujuan mendukung transparansi dan akurasi laporan keuangan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri mendorong instansi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan aplikasi digital dalam penyusunan laporan keuangan, salah satu adalah aplikasi EPRA (Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran).

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, pemerintah daerah didorong untuk memanfaatkan teknologi informasi berbasis digital. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah aplikasi EPRA (Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran), yakni sistem berbasis web yang dirancang untuk mempermudah proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan realisasi anggaran secara sistematis dan real-time. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur yang mendukung transparansi dan akurasi dalam pencatatan serta penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Aplikasi EPRA merupakan sistem berbasis web yang dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk menunjang transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran. Sistem ini dirancang tidak hanya sebagai alat pelaporan semata, tetapi juga sebagai sarana evaluatif yang memungkinkan setiap perangkat daerah memantau progres pelaksanaan kegiatan secara real-time, mulai dari tahap perencanaan hingga pencapaian target keuangan dan fisik. Dengan fitur-fitur seperti pelaporan rencana kas, input data realisasi fisik dan keuangan, hingga cetak otomatis laporan realisasi anggaran, EPRA diharapkan mampu mengurangi potensi kesalahan dalam pelaporan manual serta mempercepat penyusunan laporan keuangan secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemanfaatan aplikasi ini secara tepat menjadi bagian penting dari strategi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu.

Penelitian oleh Natalia Mamengko (2022) sebelumnya telah mengkaji penggunaan aplikasi EPRA pada aspek pengawasan realisasi anggaran di salah satu perangkat daerah dan menekankan pentingnya peran sistem informasi dalam mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian tersebut

memberikan gambaran mengenai kontribusi aplikasi EPRA terhadap pengawasan secara umum, namun belum secara spesifik membahas dampaknya terhadap penyusunan laporan keuangan, baik dari sisi efektivitas maupun kendala penerapannya.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan utama dari sisi fokus dan ruang lingkup kajian. Jika penelitian Natalia lebih menyoroti peran aplikasi EPRA dalam mendukung pengawasan anggaran secara menyeluruh, maka penelitian ini secara lebih spesifik mengarahkan perhatian pada bagaimana aplikasi EPRA diterapkan dalam proses penyusunan laporan keuangan di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado. Penelitian ini juga menelusuri faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan aplikasi, serta menganalisis sejauh mana sistem ini mampu meningkatkan efisiensi pelaporan dan kualitas hasil laporan keuangan.

Meskipun sistem ini dirancang untuk mempermudah pelaporan, kenyataannya di lapangan masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapannya. Beberapa hambatan yang sering ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya manusia dalam pengoperasian sistem, kurangnya pelatihan teknis, kendala jaringan, serta keterlambatan penginputan data. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan penggunaan sistem informasi keuangan tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dan kapasitas penggunanya.

Penelitian mengenai aplikasi EPRA juga telah dilakukan oleh (Goni et al., 2020), menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran melalui sistem tersebut di Pemerintah Kota Manado secara umum. Fokus penelitian tersebut berada pada aspek keterbukaan informasi kepada publik dan aksesibilitas data anggaran melalui aplikasi EPRA. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam bagaimana sistem ini digunakan secara teknis dalam proses penyusunan laporan keuangan oleh instansi pengawasan internal.

Berbeda dengan penelitian tersebut, kajian ini secara khusus meneliti analisis penerapan aplikasi EPRA dalam penyusunan laporan keuangan di lingkungan Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas operasional sistem dalam mendukung akurasi laporan keuangan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi selama pelaksanaannya, serta mengevaluasi sejauh mana

aplikasi ini mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan anggaran.

Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado sebagai salah satu pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam menjamin tercapainya tata kelola yang baik (*good governance*), termasuk dalam aspek pelaporan keuangan. Oleh karena itu penerapan aplikasi EPRA dalam proses penyusunan laporan keuangan di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado menjadi objek penting untuk dianalisis. Evaluasi terhadap penerapan ini dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana sistem berjalan efektif dan apa saja tantangan yang dihadapi.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memahami penerapan aplikasi EPRA secara lebih mendalam dan memberikan masukan bagi peningkatan sistem pelaporan keuangan daerah. Atas dasar itulah, penulis mengangkat judul “**Analisis Penerapan Aplikasi EPRA dalam Penyusunan Laporan Keuangan di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian yaitu: Bagaimana Penerapan Aplikasi EPRA dalam Penyusunan Laporan Keuangan di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Penerapan Aplikasi EPRA dalam Penyusunan Laporan Keuangan di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun akademis bagi berbagai pihak yang terkait. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Bagi Inspektorat

Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai sejauh mana aplikasi EPRA telah diterapkan secara efektif dalam proses penyusunan laporan

keuangan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak manajemen dalam meningkatkan kinerja sistem, memperbaiki kelemahan yang ada, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

2. Bagi Politeknik Negeri Manado

Penelitian ini turut memberikan kontribusi sebagai tambahan referensi ilmiah di lingkungan akademik, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik dan sistem informasi keuangan daerah. Penelitian ini juga dapat menjadi contoh kajian empiris yang relevan dengan perkembangan digitalisasi tata kelola keuangan pemerintah daerah, yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, dosen, maupun lembaga sebagai bahan pembelajaran dan penelitian lanjutan.

3. Bagi Penulis

Bagi penulis sendiri, penelitian ini menjadi sarana untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan ke dalam praktik nyata. Selain itu, proses penelitian ini juga memperkaya pemahaman penulis mengenai sistem pengelolaan keuangan daerah serta pentingnya penerapan teknologi dalam mendukung efisiensi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

2.1.1 Pengertian LKPD

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan pemerintah daerah dalam satu periode anggaran. LKPD bertujuan untuk memberikan gambaran kinerja dan kondisi keuangan pemerintah daerah, serta sebagai alat pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah merupakan laporan terstruktur yang mencakup berbagai aspek keuangan, seperti : rincian pendapatan dan belanja, posisi keuangan, perubahan ekuitas, arus kas, catatan atas laporan keuangan. LKPD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan bertujuan untuk : memberikan gambaran kinerja dan kondisi keuangan daerah, menunjukkan akuntabilitas, memfasilitasi pengambilan keputusan, memenuhi kebutuhan informasi bagi berbagai pihak.

Menurut (Siahaan & Simanjuntak, 2020), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan gabungan dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.

Menurut (Alrahim & Wibowo, 2022), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan APBD.

Setiap entitas, termasuk pemerintah daerah, wajib menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Pada dasarnya LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD).

2.1.2 Tujuan LKPD

Laporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan,

baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan keuangan pemerintah bertujuan menyediakan informasi mengenai:

1. Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.1.3 Jenis-jenis LKPD

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terdiri dari dua jenis utama: laporan pelaksanaan anggaran (LRA dan LP-SAL) dan laporan keuangan (Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan). Berikut adalah jenis-jenis laporan keuangan pemerintahan daerah menurut PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsure LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi.

Berikut adalah format Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disusun khusus untuk Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado, sebagai bagian dari laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado.

Tabel 2. 1 Format Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Uraian
Pendapatan
Pendapatan Transfer dari Pemerintah Kota Manado
– Dana Alokasi Umum (DAU)
– Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengawasan/inspektorat
Jumlah Pendapatan
Belanja
Belanja Operasi
– Belanja Pegawai
– Belanja Barang dan Jasa
– Belanja Perjalanan Dinas
– Belanja Pemeliharaan
Belanja Modal
– Pengadaan Peralatan dan Mesin
– Renovasi Gedung Kantor
Jumlah Belanja

Surplus / (Defisit)
Pembiayaan
– Penerimaan SiLPA Tahun Sebelumnya
– Pengeluaran Pembiayaan (misalnya untuk penyertaan modal)
Pembiayaan Neto
Sisa (Lebih/Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA / SiKPA)

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Manado, 2025

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LRA dan LPSAL merupakan laporan pelaksanaan anggaran yang bersifat cash basis.

Berikut adalah format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) yang disusun khusus untuk Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado, sebagai bagian dari laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado.

Tabel 2. 2 Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Uraian
Saldo Anggaran Lebih Awal
Penyesuaian terhadap SAL Awal
Saldo Anggaran Lebih Setelah Penyesuaian
Surplus / (Defisit) dari LRA
Penggunaan SAL untuk Pembiayaan Tahun Berjalan
Transfer ke Cadangan
Penggunaan Cadangan
Saldo Anggaran Lebih Akhir

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Manado, 2025

3. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri atas:
- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan social di

masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah.

Berikut adalah format Neraca yang disusun khusus untuk Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado, sebagai bagian dari laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado.

Tabel 2. 3 Format Neraca

ASET
Aset Lancar
Kas di Bendahara Pengeluaran
Piutang Lain-lain
Persediaan
Uang Muka
Aset Lancar Lainnya
Jumlah Aset Lancar
Aset Non-Lancar / Aset Tetap
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Akumulasi Penyusutan (-)
Jumlah Aset Tetap
Aset Lainnya
Aset Dalam Penyelesaian
Aset Tak Berwujud
Aset Lain-lain
Jumlah Aset Lainnya
TOTAL ASET
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek
Utang Belanja
Utang PPK (Penerimaan Pihak Ketiga)
Utang Pajak
Kewajiban Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Panjang
Utang Jangka Panjang Lainnya (jika ada)
TOTAL KEWAJIBAN
EKUITAS
Ekuitas Awal
Surplus/Defisit LO
Koreksi Ekuitas
Ekuitas Akhir
TOTAL EKUITAS

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Manado, 2025

4. Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur LO antara lain adalah:

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai penghubung nilai kekayaan bersih.
- Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Berikut adalah format Laporan Operasional (LO) yang disusun khusus untuk Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado, sebagai bagian dari laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado.

Tabel 2. 4 Format Laporan Operasional (LO)

PENDAPATAN LO
Pendapatan Jasa Layanan (jika ada)
Pendapatan Hibah
Pendapatan Transfer

Pendapatan Lainnya
Jumlah Pendapatan
BEBAN
Beban Pegawai
Beban Barang dan Jasa
Beban Pemeliharaan
Beban Perjalanan Dinas
Beban Penyusutan Aset Tetap
Beban Lainnya
Jumlah Beban
SURPLUS / (DEFISIT) DARI OPERASI
PENGHASILAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
Pendapatan Luar Biasa
Beban Luar Biasa
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Lalu
Jumlah Penghasilan/Beban Non Operasional
SURPLUS / (DEFISIT) LO

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Manado, 2025

5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE disusun berdasar hasil perhitungan dalam LO yaitu akun surplus/defisit LO yang ditambahkan dengan saldo ekuitas awal untuk memperoleh ekuitas akhir.

Berikut adalah format Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang disusun khusus untuk Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado, sebagai bagian dari laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado.

Tabel 2. 5 Format Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Uraian
Ekuitas Awal Tahun
Surplus / (Defisit) Laporan Operasional (LO)
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
Peningkatan/Penurunan Ekuitas Lainnya
Jumlah Perubahan Ekuitas
Ekuitas Akhir Tahun

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Manado, 2025

6. Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Usur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari:
- Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
 - Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum daerah.

Berikut adalah format Laporan Arus Kas (LAK) yang disusun khusus untuk Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado, sebagai bagian dari laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado.

Tabel 2. 6 Format Laporan Arus Kas (LAK)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan dari Pendapatan Transfer
Penerimaan Hibah Operasional (jika ada)
Penerimaan Lain-lain
Pembayaran Belanja Pegawai
Pembayaran Belanja Barang dan Jasa
Pembayaran Perjalanan Dinas
Pembayaran Beban Pemeliharaan
Pembayaran Beban Lainnya
Jumlah Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN
Pembayaran untuk Perolehan Aset Tetap
Pembayaran untuk Peningkatan Aset Tetap
Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap
Jumlah Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN
Penerimaan SiLPA Tahun Sebelumnya
Pengeluaran Pembiayaan (misalnya untuk penyertaan modal, jika ada)
Jumlah Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan
KENAIKAN / PENURUNAN BERSIH KAS
Kas Awal Tahun
Kas Akhir Tahun

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Manado, 2025

7. Catatan atas laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Laporan Keuangan merupakan hasil akhir suatu proses kegiatan pencatatan akuntansi yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode tahun buku bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh bagian akuntansi untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak manajemen dan kepada pihak perusahaan. Laporan keuangan merupakan dokumen yang menyajikan posisi keuangan, kinerja keuangan, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas dalam periode tertentu.

Dalam laporan keuangan terdapat informasi penting tentang hasil perusahaan dalam hal posisi laporan keuangan di perbankan, laporan keuangan dapat menjadi alat untuk melihat kesehatan bank (Prihatin & Anjani, 2021).

Menurut (Sumanti et al., 2022), dalam praktiknya, penyusunan laporan keuangan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Permasalahan tersebut menyebabkan proses pelaporan keuangan belum sepenuhnya berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan dalam sistem pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam mengelola berbagai potensi daerah, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya keuangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dituntut untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip tersebut mencakup transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas, yang menjadi landasan penting dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang tertib, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan untuk pengguna laporan keuangan, baik saat ini maupun dalam periode tertentu. Laporan keuangan juga bisa disusun secara mendadak sesuai kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. Jelasnya adalah laporan keuangan dapat memberikan informasi kepada pihak internal atau pihak eksternal yang memiliki kepentingan pada perusahaan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat dan terkini kepada pihak yang berkepentingan, seperti investor, kreditor, atau organisasi nirlaba.

Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan sebuah perusahaan biasanya tergantung dari seberapa besar informasi yang disajikan oleh perusahaan itu bisa berguna bagi seluruh penggunanya, juga bagaimana menyusun laporan keuangan berdasarkan kerangka konseptual dan prinsip-prinsip dasar sesuai tujuan akuntansi. Kualitas laporan keuangan dikatakan baik apabila informasi yang disajikan dalam laporan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan tersebut (1) andal, (2) relevan, (3) dapat dipahami, dan (4) dapat dibandingkan. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan. Kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh pada akuntabilitas, dengan kualitas laporan keuangan yang baik akan memberikan dedikasi terhadap akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat. Alat untuk memfasilitasi agar laporan keuangan tersebut semakin transparan dan

akuntabel yaitu dengan SAP. Dengan menerapkan SAP informasi keuangan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dipemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. SAP mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Dalam standar akuntansi terdapat beberapa karakteristik kualitatif yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna maupun dapat dikatakan berkualitas, yaitu:

a. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini adalah pemakai diasumsikan sudah mempunyai pengetahuan yang baik mengenai aktifitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta memiliki kemauan untuk terus mempelajari informasi secara berangsur.

b. Relevan

Informasi harus relevan agar memenuhi kebutuhan pemakai dalam pengambilan keputusan. Informasi dikatakan relevan apabila mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dalam membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

c. Andal

Informasi dikatakan andal bila informasi itu bebas dari pengertian yang menyesatkan, memiliki kesalahan material, dan dapat diandalkan oleh pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan.

d. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja perubahan posisi keuangan secara relatif.

2.2 Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem informasi akuntansi pemerintah daerah (Pemda) merupakan sebuah mekanisme terpadu yang berfungsi untuk mencatat, mengolah, dan menyajikan data keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran publik. Sistem ini dibangun untuk mendukung pencapaian tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas. Dalam konteks pemerintah daerah, sistem ini menjadi sarana utama dalam pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar nasional dan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sistem informasi keuangan daerah wajib diselenggarakan secara terintegrasi dalam rangka mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran daerah. Regulasi ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah, termasuk pencatatan akuntansi, harus dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi yang andal, seperti aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Menurut (Alamsyah dan Kurniawan, 2021), sistem informasi akuntansi pemerintah daerah membantu dalam mempercepat proses penyusunan laporan keuangan, meningkatkan akurasi data, serta mempermudah pengawasan dan audit internal. Sistem ini juga berfungsi sebagai alat untuk menghindari kesalahan pencatatan manual dan meminimalkan risiko manipulasi data anggaran.

Dalam penerapannya, sistem informasi akuntansi Pemda memungkinkan pemerintah daerah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dengan sistem ini, laporan keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, dan laporan lainnya dapat dihasilkan secara sistematis dan sesuai waktu.

Di lingkungan Pemerintah Kota Manado, salah satu bentuk implementasi sistem informasi akuntansi adalah melalui penggunaan aplikasi EPRA. Aplikasi ini berperan sebagai alat bantu dalam proses pencatatan realisasi anggaran serta pelaporan keuangan berbasis kas yang akurat dan tepat waktu. Dengan sistem EPRA, Kantor Inspektorat Daerah dapat menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi anggaran secara lebih efisien dan terukur.

2.2.1 Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem informasi akuntansi pemerintah daerah memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari sistem informasi akuntansi sektor privat. Hal ini disebabkan oleh orientasi utama pengelolaan keuangan daerah yang bukan berfokus pada laba, melainkan pada akuntabilitas publik, efisiensi anggaran, serta kepatuhan terhadap regulasi. Sistem ini dirancang untuk mendukung proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan lembaga pengawas.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 77 Tahun 2020, sistem informasi keuangan pemerintah daerah harus memiliki karakteristik terintegrasi, akurat, dapat diakses secara real-time, serta memenuhi prinsip-prinsip pengendalian internal. Sistem tersebut wajib mampu mengakomodasi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah dalam satu kesatuan sistem yang transparan.

Selain itu, dalam pandangan (Susanto 2020), sistem informasi akuntansi pemerintah daerah memiliki ciri utama yaitu:

1. Berbasis regulasi – sistem dirancang mengikuti standar nasional seperti SAP dan Permendagri.
2. Berorientasi pada pelayanan publik – sistem digunakan untuk pengelolaan dana publik, bukan untuk mencari keuntungan.
3. Terkait erat dengan struktur organisasi dan proses birokrasi – sistem harus sesuai dengan alur kerja dan tugas pokok OPD.
4. Menekankan pada akuntabilitas dan transparansi – semua transaksi dicatat secara terbuka dan dapat diaudit.
5. Memanfaatkan teknologi informasi – sistem berbasis digital menjadi kunci efisiensi dan kecepatan dalam pelaporan.

Karakteristik ini sangat relevan dalam konteks penggunaan aplikasi seperti EPRA di Pemerintah Kota Manado. Sebagai sistem pelaporan berbasis elektronik, EPRA tidak hanya mencatat realisasi anggaran, tetapi juga mendukung fungsi monitoring, evaluasi, dan pengawasan internal secara berjenjang. Hal ini memperlihatkan bahwa karakteristik sistem informasi akuntansi Pemda saat ini

semakin menekankan pada integrasi antar unit, kecepatan akses data, dan kemampuan pelaporan yang akurat.

2.2.2 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah

Adapun tujuan dari sistem informasi akuntansi pemerintah daerah antara lain:

1. Menyediakan informasi keuangan yang andal bagi para pengambil kebijakan di lingkungan pemerintah daerah.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik (*good governance*).
3. Mendukung penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
4. Mempermudah proses pengawasan dan audit internal oleh aparat pengawasan seperti Inspektorat Daerah.
5. Mengintegrasikan seluruh data transaksi keuangan dari berbagai unit kerja sehingga dapat digunakan untuk evaluasi kinerja anggaran secara menyeluruh.

2.2.3 Prosedur Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah melalui Aplikasi EPRA

Salah satu elemen penting dalam sistem informasi akuntansi adalah flowchart, yaitu bagan alur yang menggambarkan langkah-langkah kerja atau proses secara sistematis dan logis. Menurut Kendall & Kendall (2020), flowchart digunakan untuk memvisualisasikan prosedur dalam sistem informasi, termasuk aliran data, urutan aktivitas, dan pihak yang terlibat dalam suatu proses.

Dalam konteks Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado, flowchart digunakan untuk menggambarkan alur pelaporan keuangan melalui aplikasi EPRA, yang merupakan bagian dari sistem informasi akuntansi pemerintah daerah. Aplikasi EPRA membantu mengelola input data kegiatan, realisasi fisik dan keuangan, hingga menghasilkan rekap laporan realisasi anggaran.

Langkah-langkah Prosedur Pelaporan Keuangan Melalui EPRA:

1. Login ke sistem aplikasi EPRA

Proses dimulai dengan login oleh operator atau pengguna yang telah diberi akses resmi. Setiap pengguna menggunakan akun pribadi berupa username dan password untuk masuk ke sistem. Tahapan ini berfungsi untuk menjaga keamanan

akses data dan memastikan hanya pihak berwenang yang dapat mengelola informasi keuangan.

2. Input Data Pagu Anggaran & Target Fisik dan Keuangan

Setelah berhasil login, operator melakukan input data pagu anggaran, serta menetapkan target capaian fisik dan keuangan berdasarkan dokumen resmi seperti DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran). Informasi ini menjadi dasar perencanaan dan pemantauan kinerja anggaran.

3. Input Realisasi Fisik dan Keuangan & RAK

Operator kemudian menginput realisasi fisik dan keuangan bulanan sesuai pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selain itu, dilakukan juga pengisian Rencana Realisasi Anggaran Kas (RAK) untuk memproyeksikan kebutuhan kas setiap bulan. Data ini penting dalam menjaga kelancaran operasional dan pengendalian kas.

4. Validasi Data

Sebelum data disimpan, operator melakukan validasi internal untuk memastikan data yang diinput telah sesuai dengan dokumen pendukung dan tidak terjadi kesalahan input. Validasi ini bertujuan untuk menjamin ketepatan dan keakuratan informasi sebelum naik ke tahap selanjutnya.

5. Simpan Data ke Server

Setelah melalui proses validasi, data akan disimpan secara otomatis ke dalam server pusat aplikasi EPRA. Sistem ini berbasis digital sehingga seluruh data tersimpan secara terpusat, aman, dan dapat dilacak kembali (audit trail).

6. Verifikasi oleh PPK/Atasan

Selanjutnya, data yang telah masuk ke sistem diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau atasan langsung. Mereka meninjau kembali isi data untuk memastikan bahwa kebenaran, kelengkapan, dan kesesuaian informasi sudah terpenuhi sebelum dijadikan dasar penyusunan laporan.

7. Penyusunan Laporan Otomatis

Setelah diverifikasi, sistem EPRA akan secara otomatis menyusun laporan keuangan dan realisasi kegiatan. Proses ini menghilangkan kebutuhan input

manual laporan, sehingga mempercepat waktu pelaporan dan meminimalisir risiko kesalahan rekap.

8. Cetak & Distribusi Laporan

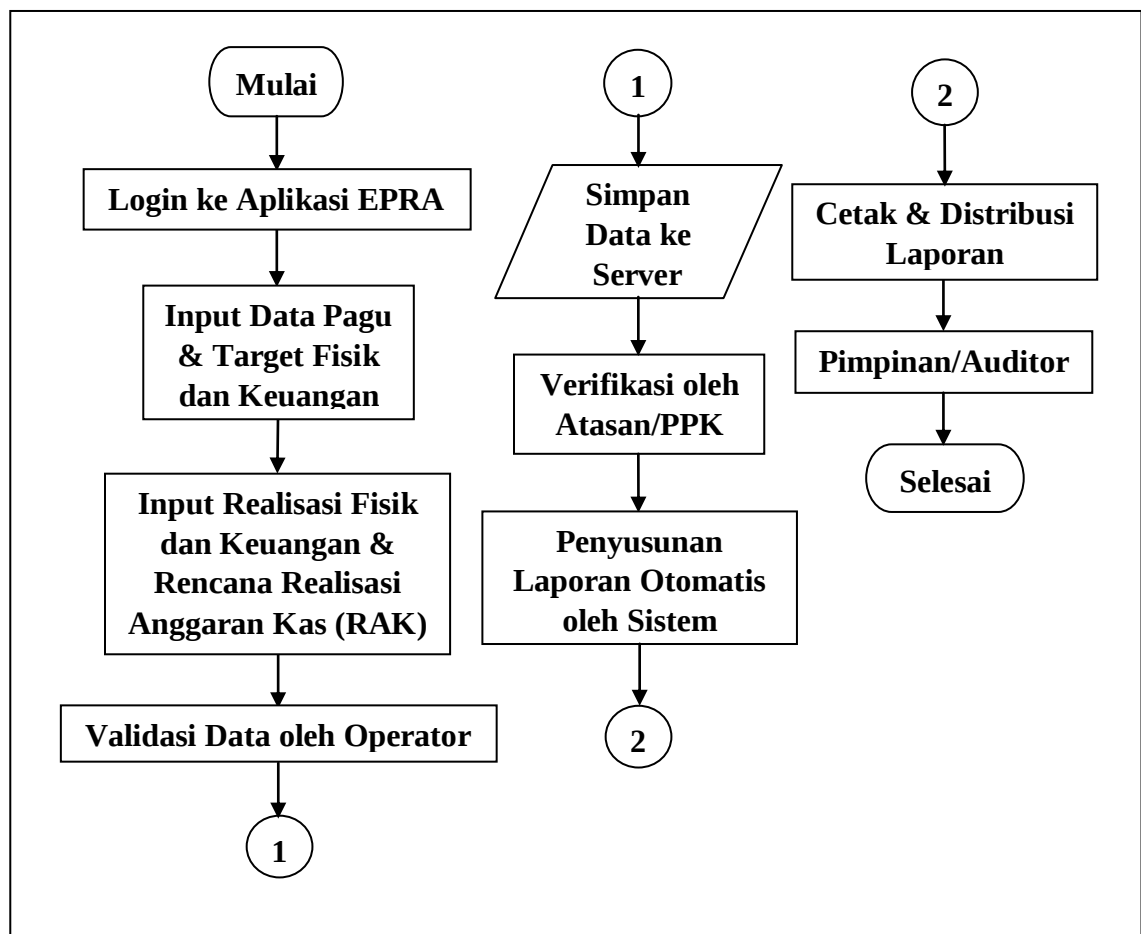
Laporan yang telah tersusun dapat langsung dicetak dan didistribusikan ke pihak terkait. Laporan ini menjadi dokumen resmi pertanggungjawaban anggaran, serta digunakan dalam proses monitoring dan evaluasi.

9. Pimpinan/Auditor

Laporan yang telah dicetak diserahkan kepada pimpinan instansi atau auditor internal/eksternal sebagai bahan evaluasi dan pengawasan. Proses ini merupakan bagian penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Berikut adalah deskripsi prosedur pelaporan keuangan menggunakan EPRA yang divisualisasikan dalam bentuk flowchart:

Gambar 2. 1 Flowchat Prosedur Pelaporan Keuangan Aplikasi EPRA



2.3 Aplikasi EPRA

Aplikasi EPRA adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengawasi realisasi anggaran. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan pelaporan realisasi anggaran, baik ditingkat kota maupun kabupaten. Aplikasi EPRA juga merupakan sebuah aplikasi berbasis digital yang digunakan oleh pemerintah daerah di kota Manado. Aplikasi EPRA merupakan sistem yang dikembangkan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah, termasuk perencanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan.

Aplikasi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam proses perencanaan serta pengelolaan anggaran, sehingga meminimalisir kesalahan dan penyalahgunaan dana. Aplikasi EPRA dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penganggaran serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan pemerintahan daerah. Menurut penelitian sebelumnya, penerapan aplikasi EPRA dapat meningkatkan efisiensi kerja karena sistem ini mampu mengurangi kesalahan pencatatan dan mempercepat proses penyusunan laporan keuangan. Selain itu, aplikasi EPRA juga mendukung integrasi data keuangan antar unit kerja, sehingga mempermudah dalam pengawasan dan evaluasi anggaran.

Laporan realisasi anggaran menjadi salah satu komponen utama dalam pelaporan keuangan pemerintah. Laporan ini disusun untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Tujuannya adalah agar para pemangku kepentingan dapat memahami dan mengevaluasi sejauh mana realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, dan transfer dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai alat untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, serta memastikan bahwa kegiatan keuangan pemerintah telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks reformasi keuangan negara, berbagai perubahan perlu dilakukan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Pemerintah daerah, sebagai bagian dari organisasi sektor publik, memiliki peran penting dalam mendukung upaya tersebut. Sebagai

penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal, pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat, tetapi juga mengelola keuangan daerah secara optimal demi mendorong pemanfaatan potensi lokal dan mempercepat pembangunan wilayah (Natalia Mamengko, 2022).

2.3.1 Peran Aplikasi EPRA dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Aplikasi EPRA berperan penting dalam penyusunan laporan keuangan, terutama Laporan Realisasi Anggaran (LRA). EPRA membantu dalam pengumpulan data, pengolahan informasi, dan pelaporan yang lebih akurat dan efisien, sehingga memudahkan penyusunan LRA yang valid dan transparan. Berikut adalah peran spesifik aplikasi EPRA dalam penyusunan laporan keuangan:

1. Pengumpulan Data: EPRA berfungsi sebagai sistem informasi untuk mengumpulkan data terkait realisasi anggaran, termasuk penerimaan dan pengeluaran, serta data pendukung seperti data fisik kegiatan.
2. Pengolahan Data: Aplikasi EPRA dapat mengolah data yang dikumpulkan untuk menghasilkan berbagai laporan, seperti Laporan Realisasi Anggaran Kas, Laporan Proyek Strategis, dan laporan realisasi per program, kegiatan, dan sub-kegiatan.
3. Pelaporan: EPRA memfasilitasi penyusunan dan pelaporan LRA yang lengkap dan akurat, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Evaluasi: EPRA juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam pelaksanaan anggaran.
5. Pengawasan: Aplikasi EPRA membantu dalam pengawasan realisasi anggaran, sehingga dapat mencegah penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas.
6. Transparansi: EPRA meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dengan menyediakan data yang mudah diakses oleh publik.

2.3.2 Peran Pihak yang Terlibat di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado

Dalam implelementasi aplikasi EPRA di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado, terdapat beberapa pihak yang berperan penting dalam memastikan proses pengimputan data, pengelolaan dan pelaporan keuangan berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan prosedur. Setiap pihak memiliki tanggung jawab secara spesifik yang saling mendukung satu sama lain dalam pelaksanaan tugasnya sebagai berikut:

1. Operatot Keuangan/Admin Aplikasi EPRA:

Operator merupakan pelaksana teknis utama dalam pengoperasian aplikasi EPRA. Mereka bertugas untuk:

- a. Melakukan input data pagu anggaran, realisasi fisik dan keuangan dan target fisik dan keuangan
- b. Memasukkan reencana realisasi anggaran kas secara berkala
- c. Memastikan data yang di input sudah selesai dengan dokumen dan intruksi dari atasan
- d. Melakukan perbaikan jika terjadi kesalahan input atau revisi data.

Operator memiliki peran sentral dalam menjamin keakuratan data dalam sistem, karena hasil pelaporan sepenuhnya bergantung pada ketetapan data yang dimasukkan.

2. Kepala Sub Bagian Perencanaan atau Keuangan:

Kepala sub bagian bertindak sebagai pengendali teknis yang mengawasi dan memverifikasi data yang telah dimasukkan oleh operator. Peran mereka sebagai berikut:

- a. Melakukan pengecekan terhadap kesesuaian data input dengan dokumen sumber
- b. Mengkoordinasi pengumpulan data dari masing-masing bidang
- c. Memberikan persetujuan untuk laporan yang akan dicetak atau diajukan ke pimpinan.

Peran kepala sub bagian sangat strategis dalam menjembatani antara level pelaksana (operator) dan pengambilan keputusan (pimpinan).

3. Kepala Bidang/Penanggung Jawab Kegiatan:

Kepala bidang bertanggung jawab untuk menyampaikan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, seperti:

- a. Target fisik dan keuangan kegiatan yang direncanakan
- b. Capaian fisik dan realisasi anggaran berdasarkan pelaksanaan dilapangan
- c. Laporan bulanan terkait kendala atau progress kegiatan.

Peran kepala bidang sangat penting dalam menjamin bahwa data yang masuk ke sistem benar-benar mencerminkan kondisi yang riil pelaksanaan program.

4. Kepala Inspektorat Daerah Kota Manado:

Sebagai pimpinan tertinggi di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado, memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Tugas dari kepala pimpinan antara lain:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian keuangan dan kegiatan dari laporan aplikasi EPRA
- b. Menggunakan informasi dari aplikasi EPRA sebagai dasar dalam evaluasi kinerja bidang
- c. Memberikan arahan dan keputusan atas hasil laporan keuangan yang dihasilkan.

Dengan adanya akses langsung terhadap data aplikasi EPRA, kepala Inspektorat Daerah Kota Manado dapat dengan cepat mengambil tindakan atau kebijakan berdasarkan data yang akurat dan real-time.

5. Tim IT atau Pengelola Sistem:

Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam pelaporan keuangan, tim teknis memiliki peran penting dalam:

- a. Menyediakan dukungan teknis apabila terjadi eror pada sistem
- b. Menangani permasalahan akses atau pembaruan sistem
- c. Melatih operator baru jika dibutuhkan.

Tim ini menjadi pendukung dalam operasional agar aplikasi EPRA dapat berjalan secara optimal tanpa gangguan teknis yang menghambat pelaporan.

2.3.3 Dampak Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Penerapan aplikasi EPRA di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Akuntabilitas keuangan mengacu pada kemampuan instansi pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan anggaran secara terbuka, dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan prinsip good governance. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait dampak aplikasi EPRA terhadap akuntabilitas keuangan:

1. Transparansi Informasi Keuangan:

Aplikasi EPRA menyajikan informasi keuangan secara terbuka dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan sesuai dengan hak aksesnya. Data mengenai pagu anggaran, realisasi fisik dan keuangan, serta target fisik dan keuangan ditampilkan

secara jelas, lengkap dan real-time. Hal ini memberikan ruang bagi pimpinan dan pejabat terkait untuk melakukan pengawasan internal yang lebih baik.

Dampak: Peningkatan transparansi mendorong terciptanya budaya kerja dan jujur dan terbuka serta meminimalisir praktik manipulasi atau rekayasa laporan.

2. Peningkatan Tanggung Jawab Setiap Pihak:

Dengan sistem aplikasi EPRA, setiap input dan aktivitas dalam aplikasi dapat ditelusuri kembali ke pengguna yang melakukan tindakan tersebut. Hal ini menciptakan sistem kinerja yang lebih disiplin dan bertanggung jawab karena setiap pengguna sadar bahwa aktivitas mereka terekam dan dapat di audit.

Dampak: Tumbuhnya rasa tanggung jawab dan kehati-hatian dalam pengelolaan data keuangan karena adanya sistem log dan jejak digital (audit trail).

3. Kepatuhan terhadap Prosedur dan Regulasi:

Aplikasi EPRA membantu memastikan bahwa proses penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan. Format laporan yang dihasilkan dari sistem telah sesuai dengan standar laporan pemerintah, seperti LRA dan realisasi fisik dan keuangan.

Dampak: Menurunnya risiko kesalahan administrative dan meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah.

4. Kemudahan Monitoring dan Evaluasi:

Pimpinan dapat langsung memantau capaian anggaran dan kegiatan dari laporan yang tersedia di sistem aplikasi EPRA. Hal ini sangat membantu dalam mengambil keputusan berbasis data, mempercepat proses evaluasi dan memberikan solusi terhadap kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

Dampak: Proses evaluasi kinerja menjadi lebih objektif dan terukur karena didukung dengan data yang aktual dan valid.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi satu acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2. 7 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Goni et al., (2020)	Transparansi pengelolaan anggaran melalui aplikasi web cerdas Epra Online (CEO) Kota Manado	Kualitatif	Dari hasil penelitian yang dilakukan masih kurangnya transparansi pengelolaan anggaran melalui aplikasi web EPRA kota manado karena tidak memberikan informasi yang jelas dan rinci mengenai bagaimana pengelolaan anggaran yang ada di kota manado.
2.	Dian Natalia Mamengko (2022)	Pelaporan realisasi anggaran pada aplikasi EPRA di kabupaten Minahasa	Kualitatif	Hasil penelitian ini sudah sesuai dengan mekanismenya, dengan tujuan untuk memperoleh data realisasi yang valid sesuai anggaran kas dan target yang telah ditetapkan, walau masih ada perangkat daerah yg tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan pada aplikasi EPRA.
3.	Sumanti et al., (2022)	Evaluasi penyajian laporan	Metode Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

		keuangan berdasarkan akuntansi pemerintahan di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota manado		sudah sesuai dengan mengacu pada peraturan pemerintah No.71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan baik itu tujuan laporan keuangan, komponen-komponen laporan keuangan, ruang lingkup dan periode serta kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota manado.
4.	Siahaan & Simanjuntak, (2020)	Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan	Asosiatif Kausal	Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terbukti mampu meningkatkan ketepatan dan kecepatan dalam pelaporan, sementara

		Keuangan (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara)		pemahaman yang baik terhadap standar akuntansi pemerintahan berkontribusi pada penyusunan laporan yang sesuai prinsip akuntansi dan regulasi yang berlaku. Selain itu, sistem pengendalian internal yang efektif juga berperan penting dalam menjaga keandalan dan akurasi data keuangan yang disajikan dalam laporan.
5.	Alrahim & Wibowo, (2022)	Analisis Manfaat Laporan Keuangan Berbasis Akrua Dalam Pengambilan Keputusan Di Pemerintah Kabupaten Banteng	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan berbasis akrual memiliki manfaat yang signifikan dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih rasional dan berbasis data. Informasi yang disajikan tidak hanya mencerminkan realisasi kas, tetapi juga mencakup kewajiban dan aset pemerintah secara menyeluruh,

				sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap kondisi keuangan daerah. Hal ini membantu pimpinan daerah untuk melakukan perencanaan anggaran, pengendalian keuangan, dan evaluasi kinerja secara lebih akurat dan terukur.
--	--	--	--	--

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian yaitu Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado dan penelitian terdahulu yang telah disajikan dalam tabel berkonsentrasi untuk menjawab rumusan masalah yang ada sehingga pada hasil penelitian dapat membahas rumusan masalah secara rinci dan menghindari pembahasan tentang hal lain.

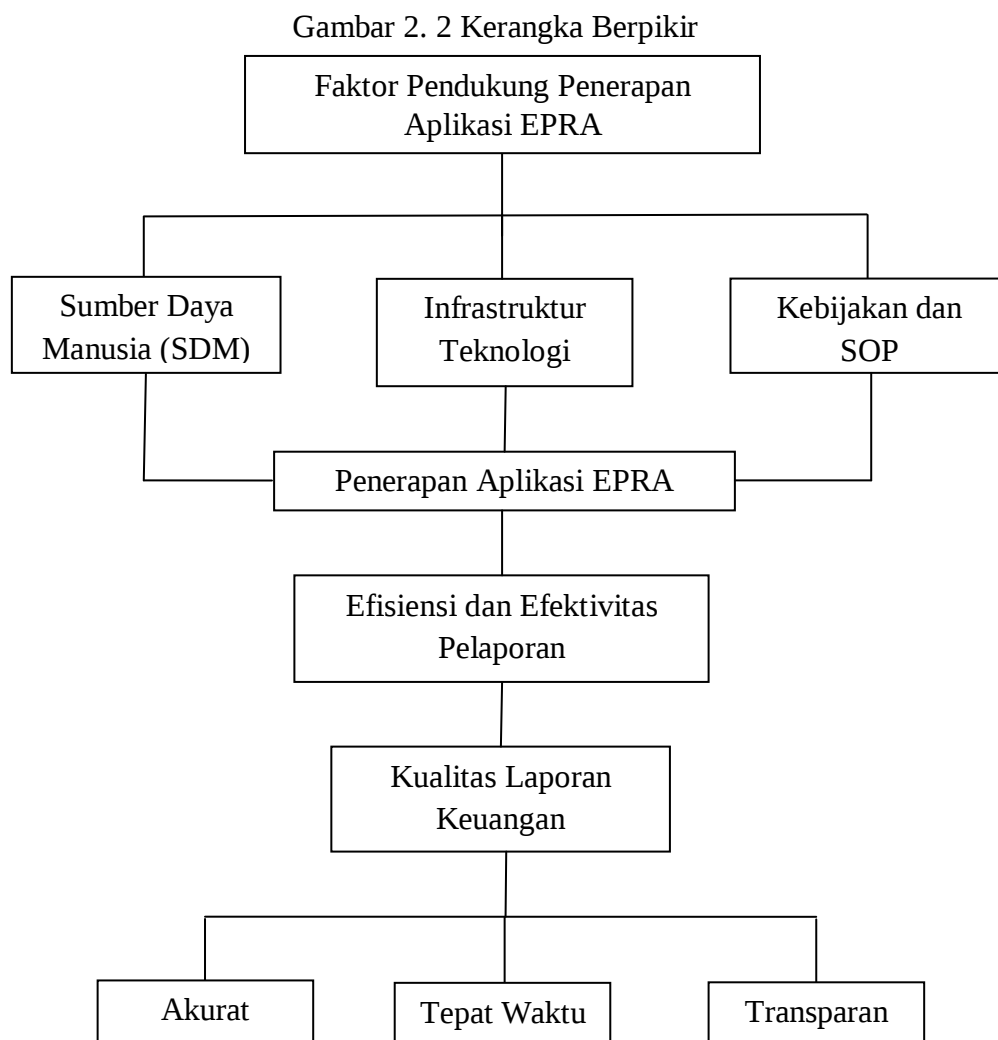
Berdasarkan hasil telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu yang telah disajikan dalam tabel, dapat disimpulkan bahwa masing-masing penelitian memiliki fokus kajian yang beragam, mulai dari efektivitas sistem informasi akuntansi, pemanfaatan teknologi dalam pelaporan keuangan, hingga analisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut cenderung membahas sistem informasi secara umum atau terfokus pada perangkat daerah tertentu tanpa menitikberatkan secara spesifik pada aplikasi EPRA.

Kelebihan dari penelitian ini terletak pada spesifisitas objek dan fokus kajian, yaitu menganalisis secara langsung penerapan aplikasi EPRA dalam proses penyusunan laporan keuangan pada Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado, yang hingga saat ini belum banyak dijadikan objek kajian akademik. Penelitian ini juga tidak hanya menggambarkan proses penggunaan aplikasi secara deskriptif, tetapi turut mengkaji efektivitas, kendala, serta faktor pendukung dan penghambat dari sisi teknis maupun sumber daya manusia, sehingga memberikan pemahaman yang lebih

komprehensif mengenai implementasi aplikasi digital dalam konteks pengawasan keuangan daerah.

Selain itu, pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih dalam melalui wawancara dan observasi langsung, sehingga temuan yang diperoleh memiliki tingkat relevansi yang tinggi dengan kondisi nyata di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih aplikatif bagi instansi terkait serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan dan sistem informasi keuangan daerah di masa mendatang.

2.5 Kerangka Berpikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis penerapan aplikasi EPRA dalam penyusunan laporan keuangan di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado. Metode ini digunakan untuk memahami proses, kendala, serta efektivitas aplikasi EPRA berdasarkan pengalaman dan persepsi para pegawai yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali makna dan pemahaman subjektif dari para responden terkait implementasi aplikasi EPRA dalam lingkungan kerja mereka. Melalui metode ini, peneliti akan memperoleh wawasan mengenai faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pemanfaatan aplikasi EPRA, serta dampaknya terhadap efisiensi dan akurasi laporan keuangan.

Menurut (Adlini et al., 2022), penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap suatu realitas dengan pendekatan berpikir induktif. Dalam prosesnya, peneliti terlibat langsung dalam situasi dan konteks fenomena yang dikaji, serta berusaha menangkap kejadian atau realitas sebagaimana adanya di lapangan. Penekanan utama dalam pendekatan ini terletak pada validitas dan kelengkapan data, yaitu sejauh mana data yang dicatat benar-benar mencerminkan kondisi nyata yang diteliti. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami secara menyeluruh pengalaman subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan dalam konteks yang alamiah, serta disajikan secara deskriptif dalam bentuk narasi menggunakan bahasa yang natural, dengan memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data yang bersifat alami.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado yang terletak di Jl Pameran, Kelurahan Kairagi Dua, Lingkungan V, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara, yang merupakan instansi pemerintah daerah yang berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan

daerah. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama bulan Februari - Mei 2025 guna memungkinkan penulis untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan oleh penulis.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer dan data sekunder adalah dua jenis data yang digunakan dalam penelitian, dengan perbedaan utama terletak pada sumber dan metode pengumpulannya. Data ini didapatkan secara langsung dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan pegawai yang menggunakan Aplikasi EPRA di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, dengan tujuan untuk melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literature, dokumen-dokumen, buku-buku serta bahan tulisan seperti jurnal dan penelitian terhadulu yang berhubungan dengan materi yang di bahas, studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang di harapkan akan dapat menunjang data yang di kumpulkan dengan pengelolaannya lebih lanjut dalam penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Penelitian kualitatif pada teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan, (wawancara, observasi dan dokumentasi).

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan salah satu pegawai yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan menggunakan aplikasi EPRA. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, di mana peneliti menyiapkan pertanyaan pokok namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan lebih lanjut sesuai pengalaman dan peran mereka. Adapun pegawai yang diwawancarai yaitu staf

pelaksana keuangan, yang bertugas melakukan input data kegiatan, realisasi fisik dan keuangan secara berkala ke dalam sistem EPRA. Melalui wawancara ini, peneliti mendapatkan informasi mengenai prosedur penggunaan aplikasi EPRA, kendala yang dihadapi, serta peran aplikasi tersebut dalam mendukung penyusunan laporan keuangan yang akuntabel.

2. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yakni di lingkungan Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado. Teknik ini digunakan untuk mengamati secara nyata bagaimana aplikasi EPRA digunakan dalam kegiatan pelaporan keuangan antara lain, proses pelaporan keuangan melalui aplikasi EPRA. Observasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara sesuai dengan praktik yang terjadi di lapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang berhubungan dengan proses pelaporan keuangan melalui aplikasi EPRA. Dokumen-dokumen tersebut dijadikan sebagai data pendukung yang memperkuat hasil wawancara dan observasi.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif sebagai teknik untuk menganalisis data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis deskriptif kualitatif berfokus pada penjabaran makna dari data yang telah dikumpulkan, tanpa menggunakan perhitungan statistik. Teknik ini dilakukan dengan cara:

1. Mengumpulkan Data:

Peneliti melakukan wawancara dengan pegawai, observasi langsung dilapangan dan pengumpulan dokumen terkait penggunaan aplikasi EPRA di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado.

2. Mengelompokkan Data:

Setelah data terkumpul, peneliti memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian, lalu mengelompokkan data berdasarkan topik.

3. Menjelaskan Data:

Data yang sudah dikelompokkan dijelaskan secara naratif atau dengan kata-kata, kemudian menginterpretasikan makna dari temuan tersebut sesuai dengan teori.

4. Menarik Kesimpulan:

Setelah data dianalisis, peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado

4.1.1 Sejarah Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado

Gambar 4. 1 Gedung Inspektorat Daerah Kota Manado



Sumber : Inspektorat Daerah Kota Manado, 2025

Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1979 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota yang berlaku sejak 6 November 1979. Pembentukan ini dipertegas melalui petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan pada 6 Desember 1979 dan ditujukan kepada seluruh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Indonesia.

Dasar hukum pembentukan Inspektorat Wilayah ini berakar pada Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1975 yang mengatur pengawasan umum pemerintahan daerah serta pelaksanaan tugas Departemen Dalam Negeri. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Bupati/Walikota dibantu oleh pejabat tertentu dalam melaksanakan fungsi pengawasan umum. Sebagai tindak lanjutnya, lahirlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1979 yang menetapkan pembentukan lembaga Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota sebagai perangkat pengawasan fungsional.

Peraturan ini sendiri merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, khususnya Bab III Bagian 16 tentang pengawasan umum. Selanjutnya, struktur organisasi Inspektorat Wilayah diperkuat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1980 yang menegaskan bahwa lembaga ini bertanggung jawab secara administratif kepada Bupati/Walikota sebagai kepala daerah tingkat II.

Pada awal 1980-an, pegawai Inspektorat Wilayah Dati II Manado mulai terdiri atas tiga jenis, yaitu pegawai daerah, pegawai pusat yang diperbantukan (DPB), dan pegawai pusat yang dipekerjakan (DPK). Pegawai DPK sepenuhnya dibiayai oleh APBN, sedangkan dua jenis lainnya oleh APBD. Namun, pada tahun 1991, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 1991, struktur organisasi kembali mengalami penyesuaian. Dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa Inspektorat merupakan aparat pengawasan fungsional yang bertanggung jawab kepada kepala daerah, dan dalam aspek teknis administratif dibina oleh Kementerian Dalam Negeri.

Perubahan signifikan terjadi seiring dengan era reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan daerah semakin diperluas dan berdampak langsung pada organisasi Inspektorat. Jika sebelumnya diatur oleh Keputusan Menteri, sejak diberlakukannya UU tersebut, pengaturan organisasi Inspektorat diserahkan kepada pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah, sesuai dengan amanat PP Nomor 84 Tahun 2000. Dalam konteks ini, Inspektorat berganti nama menjadi Badan Pengawas Daerah Kota Manado yang berada di bawah koordinasi langsung Walikota melalui Sekretaris Daerah. Seluruh pegawainya pun dialihkan status menjadi pegawai daerah, menghapus sistem DPK dan DPB.

Kemudian, melalui perubahan regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, nomenklatur Badan Pengawas Daerah dikembalikan menjadi Inspektorat. Penyesuaian lebih lanjut dilakukan berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007, yang mengatur organisasi perangkat daerah. Di Kota Manado, hal ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 yang menetapkan struktur dan tugas Inspektorat serta lembaga teknis lainnya. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa Inspektorat adalah unsur pendukung pengawasan pemerintahan

daerah, dipimpin oleh Inspektur yang bertanggung jawab kepada Walikota dan dibina secara teknis administratif oleh Sekretaris Daerah.

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diterbitkan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan melalui Perda Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Manado Nomor 35 Tahun 2016. Dalam regulasi tersebut, ditegaskan bahwa Inspektorat Kota Manado bertipe A, dipimpin oleh seorang Inspektur dan bertugas sebagai pengawas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Terakhir, seiring perubahan PP Nomor 18 Tahun 2016 menjadi PP Nomor 72 Tahun 2019, Pemerintah Kota Manado menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas dan fungsi Inspektorat, yang kemudian diperbaharui lagi melalui Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2022. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa Inspektorat Kota Manado tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah, serta bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang masih berlaku hingga saat ini.

4.1.2 Visi & Misi Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado

Gambar 4. 2 Visi & Misi



Sumber : Inspektorat Daerah Kota Manado, 2025

Visi dan Misi Inspektorat Kota Manado merupakan Implementasi yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah (PD) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2021-2026 dimana RPJMD

tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Manado terpilih periode 2021-2024.

1. Visi Kota Manado untuk periode kepemimpinan 2021-2026 adalah "**Manado Maju dan Sejahtera sebagai Beranda Sulawesi Utara dan Indonesia ke Asia Pasifik**".
2. Misi Kota Manado Ada 5 (lima) yaitu :
 - a. Peningkatan Kualitas Manusia Kota Manado
 - b. Pembangunan Infrastruktur, penataan kota, dan perluasan konektivitas
 - c. Pemerintahan yang baik dan didukung oleh sinergitas antar daerah
 - d. Penguatan Ekonomi kota yang bertumpu kepada industri jasa, perdagangan dan pariwisata.
 - e. Pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Manado terpilih, Inspektorat Kota Manado berperan penting dalam merealisasikan Misi Nomor 3, yaitu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih melalui sinergitas antar perangkat daerah. Sebagai bagian dari implementasi misi tersebut, Inspektorat menetapkan tujuan strategisnya, yaitu membangun sistem pengawasan yang mampu mencegah terjadinya praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Inspektorat Kota Manado menjalankan peran sebagai lembaga pengawasan internal (internal control) yang memiliki fungsi utama dalam mengawal, mendampingi, dan memastikan pelaksanaan program serta kebijakan Walikota dan Wakil Walikota berjalan sesuai prinsip akuntabilitas. Dalam menjalankan fungsinya, Inspektorat berperan sebagai "mata dan telinga" kepala daerah, memberikan informasi yang akurat dan objektif sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis.

Komitmen terhadap terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas sejalan dengan tugas dan fungsi Inspektorat, yaitu melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Hal ini mencakup pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan, keuangan, serta kinerja perangkat daerah agar seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip good governance.

1. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui.
 - a. Audit.
 - b. Reviu.
 - c. Evaluasi.
 - d. Pemantauan dan,
 - e. Kegiatan pengawasan lainnya;
2. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan.
3. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
4. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Sasaran merupakan hasil konkret yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu yang lebih pendek dibandingkan dengan tujuan strategis. Sasaran disusun secara lebih spesifik dan terukur, serta dilengkapi dengan indikator sasaran yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaiannya dalam periode waktu tertentu. Setiap indikator tersebut disertai dengan target capaian yang ditetapkan untuk tahun berjalan.

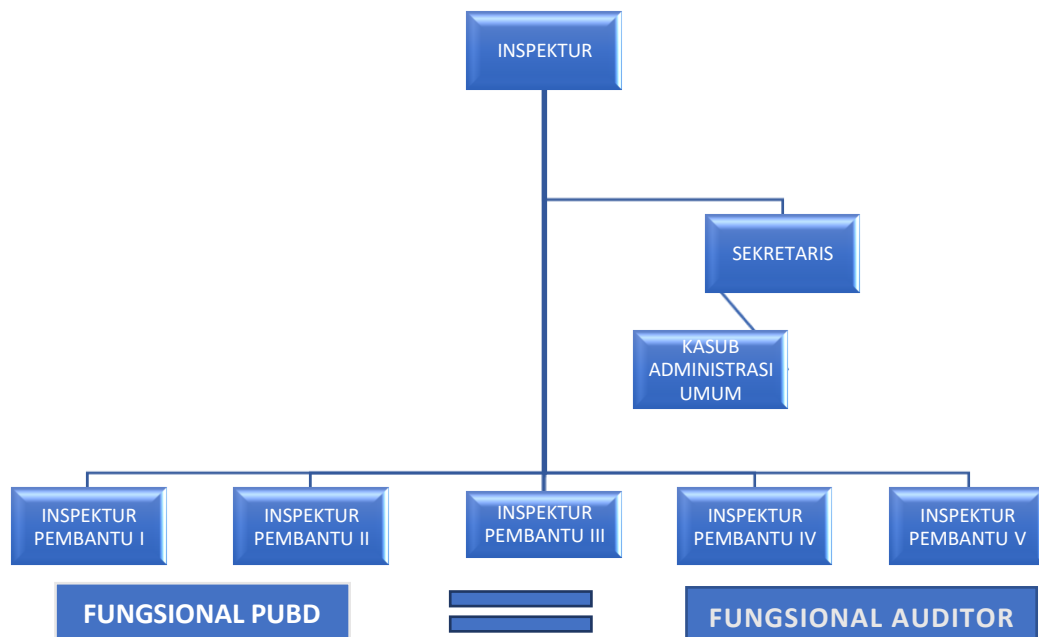
Sehubungan dengan penetapan tujuan strategis Inspektorat Kota Manado, maka telah dirumuskan sasaran-sasaran yang bersifat jangka pendek untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. Sasaran ini juga dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang berguna untuk mengukur dan memastikan bahwa capaian yang diharapkan benar-benar dapat terealisasi.

Adapun sasaran utama yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kota Manado adalah meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah serta terbangunnya sistem pengendalian internal yang semakin berkualitas. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, digunakan sejumlah indikator, antara lain: Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi sebagai ukuran capaian tujuan, serta Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada komponen evaluasi dan Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai indikator strategis.

Dengan indikator-indikator tersebut, diharapkan Inspektorat Kota Manado mampu mendukung secara optimal pencapaian Misi 3 Walikota dan Wakil Walikota Manado, yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui sinergitas antar perangkat daerah.

4.1.3 Struktur Organisasi Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado

Gambar 4. 3 Struktur Organisasi



Sumber : Inspektorat Daerah Kota Manado, 2025

4.1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Inspektorat Kota Manado sebagai salah satu Perangkat Daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Wali Kota Manado Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Kota Manado, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota dan urusan Pemerintahan Kota. Dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Inspektur, sebagai pimpinan organisasi;
2. Sekretaris, membawahkan:
 - a) Subbagian Administrasi dan Umum
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Inspektur Pembantu Wilayah III
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV
7. Inspektur Pembantu Investigasi
8. Kelompok jabatan fungsional:

- a) Fungsional Auditor;
- b) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD).

Dengan berdasarkan Wali Kota Manado Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Manado Tipe A yang memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Inspektur

Inspektur merupakan pimpinan tertinggi dalam struktur Inspektorat Daerah Kota Manado yang bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan pengawasan internal. Tugas utama Inspektur meliputi perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui berbagai metode seperti audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan. Selain itu, Inspektur juga melaksanakan pengawasan atas penugasan khusus dari Walikota, menyusun laporan hasil pengawasan, berkoordinasi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, serta mengawasi pelaksanaan program reformasi birokrasi. Di samping itu, Inspektur juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan administrasi internal Inspektorat.

2. Sekretaris

Sekretaris Inspektorat bertugas untuk mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan serta memberikan dukungan administratif dan fungsional kepada seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris memiliki fungsi-fungsi penting seperti penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian program kerja pengawasan, pengelolaan laporan hasil pengawasan, penyusunan data teknis fungsional, penanganan pengaduan, serta pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, dan tata usaha.

Di bawah Sekretaris terdapat Sub Bagian Administrasi dan Umum yang memiliki tugas antara lain mengelola kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan kantor, dan penyusunan anggaran. Sub Bagian ini juga bertanggung jawab atas pengelolaan data statistik hasil pengawasan, penginventarisasian temuan pengawasan, serta penyelenggaraan kerja sama pengawasan dan pelaporan kegiatan Inspektorat secara menyeluruh.

3. Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja, serta urusan pemerintahan daerah pada seluruh perangkat daerah. Tugas ini mencakup penyusunan kebijakan pembinaan, perencanaan program pengawasan, koordinasi pelaksanaan pengawasan, serta pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Selain itu, Inspektur Pembantu juga melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan serta menyusun dan mendistribusikan laporan pengawasan kepada pihak-pihak terkait.

4. Inspektur Pembantu Investigasi

Inspektur Pembantu Investigasi memiliki tugas khusus dalam menangani pengawasan melalui pendekatan investigatif terhadap indikasi penyalahgunaan wewenang atau dugaan kerugian negara/daerah. Fungsi utama jabatan ini meliputi penyusunan rencana operasional investigasi, perumusan kebijakan teknis investigasi, penanganan pengaduan masyarakat, pelaksanaan audit investigatif, serta pengumpulan data dan informasi terkait kasus yang diselidiki. Selain itu, Inspektur Pembantu Investigasi juga berperan dalam upaya pencegahan korupsi dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi. Jabatan ini mencakup wilayah kerja pengawasan pada instansi pemerintahan, kecamatan, dan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Manado.

4.2 Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana analisis penerapan aplikasi EPRA berperan dalam mendukung penyusunan laporan keuangan di lingkungan Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado. Data diperoleh melalui observasi langsung terhadap sistem, dokumentasi proses kerja, serta wawancara dengan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan.

Proses penggunaan aplikasi EPRA dimulai dengan login oleh pegawai yang telah memperoleh hak akses berdasarkan tanggung jawabnya. Setiap operator memiliki tugas untuk menginput data kegiatan dan keuangan yang sesuai dengan bidang masing-masing. Setelah penginputan, data tersebut harus melalui proses verifikasi dan validasi oleh pejabat teknis yang bertugas untuk memastikan bahwa

informasi yang masuk telah sesuai dengan dokumen pendukung seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), rencana kegiatan, serta bukti realisasi.

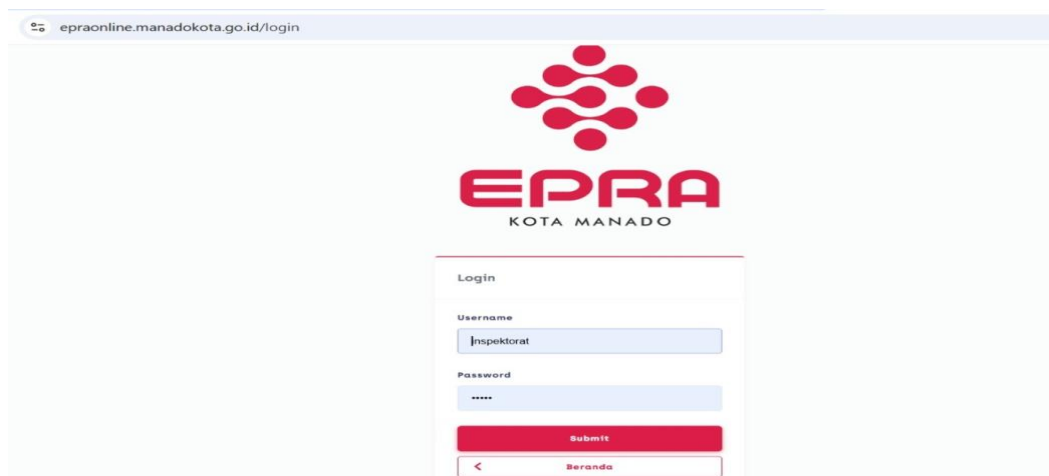
Langkah ini penting untuk menjaga keakuratan data dan menjadi dasar bagi proses monitoring serta pelaporan akhir. Prosedur yang diterapkan telah berjalan sistematis dan tersistem dalam aplikasi, yang menunjukkan bahwa sistem mendukung pelaksanaan tugas secara lebih teratur dan terkontrol.

4.2.1 Proses Login ke Sistem Aplikasi EPRA

Tahap awal penggunaan aplikasi EPRA dimulai dengan proses login yang dilakukan oleh pengguna sesuai hak akses yang telah ditentukan. Masing-masing pegawai yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaporan anggaran diberikan akun tersendiri berupa username dan password, sebagaimana ditampilkan pada gambar dibawah. Mekanisme ini bertujuan menjaga keamanan data serta membatasi akses hanya kepada pengguna yang berwenang. Berikut langkah-langkah untuk login:

- 1) Buka aplikasi EPRA melalui portal resmi Inspektorat Daerah Kota Manado.
- 2) Masukkan username dan password yang telah diberikan oleh administrator sistem.
- 3) Klik tombol “login” untuk masuk ke dashboard utama.
- 4) Jika login berhasil, pengguna akan diarahkan ke beranda atau menu utama aplikasi EPRA.
- 5) Jika gagal, sistem akan menampilkan pesan kesalahan, dan pengguna dapat mengulangi proses login atau silahkan menghubungi administrator untuk reset akun.

Gambar 4. 4 Proses Login ke Sistem Aplikasi EPRA



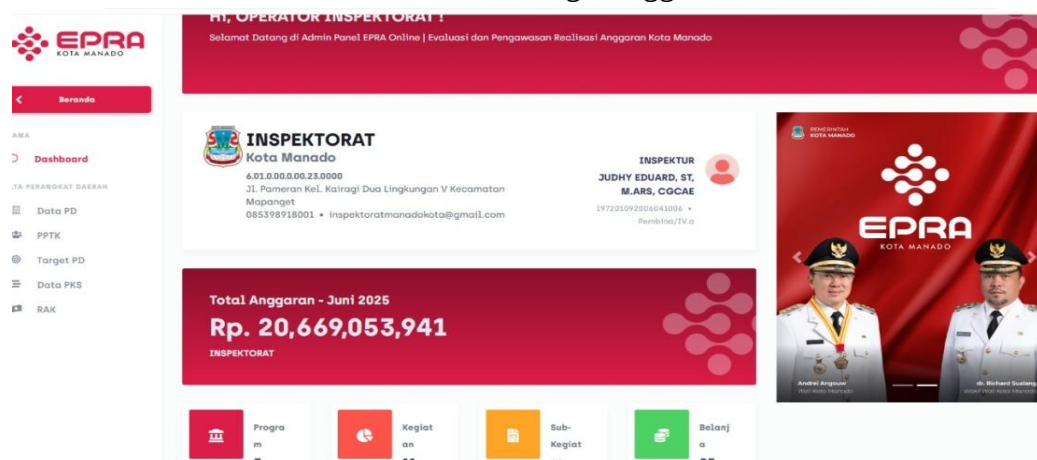
The screenshot displays the login interface of the EPRA (Evaluasi Pelaksanaan Realisasi Anggaran) system for Kota Manado. At the top, the EPRA logo is visible. Below it, a login form is presented with two input fields: 'Username' (containing 'Inspektorat') and 'Password' (masked with '****'). A red 'Submit' button is positioned below the password field, and a 'Beranda' (Home) button with a left arrow is at the bottom of the form.

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Manado, 2025

4.2.2 Penginputan Data Pagu Anggaran

Tahapan selanjutnya adalah pengisian data pagu anggaran yang mengacu pada dokumen perencanaan resmi, yakni Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Operator dari masing-masing bidang melakukan input data tersebut secara langsung ke dalam sistem menggunakan fitur yang telah tersedia. Pada semester pertama tahun 2025, jumlah pagu anggaran yang tercatat mencapai Rp20.669.053.941, sebagaimana ditampilkan pada gambar dibawah. Informasi ini menjadi landasan dalam proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Gambar 4. 5 Data Pagu Anggaran



Sumber: Inspektorat Daerah Kota Manado, 2025

4.2.3 Pengisian Realisasi Fisik dan Keuangan

Setelah penginputan data pagu, pengguna melanjutkan ke tahapan pencatatan realisasi kegiatan, baik dari sisi fisik maupun keuangan. Berdasarkan data yang diinput dalam aplikasi EPRA, pada periode Januari hingga Juni 2025, realisasi fisik kegiatan mencapai 60%, sementara realisasi keuangan baru mencapai 31,5% atau sekitar Rp6,51 miliar, sebagaimana ditampilkan pada gambar dibawah. Ketidakseimbangan antara dua indikator ini menjadi catatan penting, karena menunjukkan perlunya peningkatan dalam efektivitas penyerapan anggaran agar sejalan dengan kemajuan fisik kegiatan.

Gambar 4. 6 Realisasi Fisik dan Keuangan



Sumber: Inspektorat Daerah Kota Manado, 2025

4.2.4 Target Fisik dan Keuangan

Aplikasi EPRA juga menyediakan fitur untuk penetapan target fisik dan keuangan setiap bulan, yang berfungsi sebagai alat kontrol dalam proses evaluasi kinerja anggaran. Dari hasil input data, terlihat bahwa target keuangan akumulasi dari 4,83% dan target fisik akumulasi 5% di bulan Januari mengalami peningkatan secara bertahap hingga 59,54% target keuangan akumulasi dan 60% target fisik akumulasi di bulan Juni 2025, sebagaimana ditampilkan pada gambar dibawah. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan intensitas kegiatan, dan menunjukkan bahwa perencanaan anggaran perlu disusun secara realistis agar target yang ditetapkan dapat tercapai sesuai waktu yang direncanakan.

Gambar 4. 7 Target Fisik dan Keuangan

#	Bulan TA 2025	Pagu (Rp)	Target Keuangan		Target Keuangan Akumulasi (%)	Target Fisik Akumulasi (%)
			Bulan Berjalan	Akumulasi		
	[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]
1.	Januari	Rp. 2282	Rp. 11012879	Rp. 11012879	4.83 %	5 %
2.	Februari	Rp. 2282	Rp. 20269017	Rp. 312811	13.71 %	14 %
3.	Maret	Rp. 2282	Rp. 29795230	Rp. 610777	26.76 %	27 %
4.	April	Rp. 2066	Rp. 13179981	Rp. 742577	35.93 %	37 %
5.	Mei	Rp. 2066	Rp. 19417875	Rp. 936747	45.32 %	46 %
6.	Juni	Rp. 2066	Rp. 29381126	Rp. 123057	59.54 %	60 %

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Manado, 2025

4.2.5 Pengisian Rencana Realisasi Anggaran Kas (RAK)

Fitur selanjutnya dalam aplikasi EPRA adalah pengisian Rencana Realisasi Anggaran Kas (RAK), yang berguna untuk memproyeksikan kebutuhan kas setiap bulan. Pada bulan Januari 2025, realisasi kas tercatat sebesar 83,23%, namun kemudian menurun hingga hanya mencapai 32,79% pada bulan Mei, sebagaimana ditampilkan pada gambar dibawah. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa perencanaan kas belum sepenuhnya akurat dan konsisten dengan kebutuhan aktual di lapangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar tidak menghambat pelaksanaan program.

Gambar 4. 8 Rencana Realisasi Anggaran Kas (RAK)



#		Bulan TA 2025	RAK PD (Rp)	RAK Target (Rp)	Realisasi Keuangan Bulan Berjalan (Rp)	Sisa RAK (Rp)	Realisasi RAK (%)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.	Januari	Rp. 11012	Rp. 110128	Rp. 916653169	Rp. 18463	83.23	%
2.	Februari	Rp. 20265	Rp. 2211534	Rp. 800383633	Rp. 141111	36.19	%
3.	Maret	Rp. 29791	Rp. 439067	Rp. 1953435387	Rp. 243724	44.49	%
4.	April	Rp. 23179	Rp. 4755231	Rp. 959775096	Rp. 37954	20.18	%
5.	Mei	Rp. 19417	Rp. 573725	Rp. 1881344062	Rp. 38559	32.79	%

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Manado, 2025

4.2.6 Verifikasi dan Validasi Data

Setelah proses input data selesai dilakukan oleh operator, tahap berikutnya dalam penggunaan aplikasi EPRA adalah verifikasi dan validasi oleh pejabat teknis yang berwenang di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Manado. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang telah dimasukkan ke dalam sistem telah sesuai dengan dokumen sumber yang sah, seperti DPA, laporan realisasi kegiatan, dan bukti pendukung lainnya. Proses verifikasi dan validasi ini sangat penting karena menjadi dasar penetapan data final yang akan digunakan dalam pelaporan keuangan. Dengan demikian, kualitas data dan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan dapat terjaga dengan baik.

4.2.7 Monitoring dan Evaluasi

Setelah data divalidasi, sistem EPRA mendukung proses monitoring dan evaluasi secara menyeluruh. Melalui fitur pemantauan yang tersedia, pengguna dapat melihat sejauh mana progres realisasi kegiatan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Informasi disajikan secara real-time dan terstruktur, sehingga memudahkan pimpinan dalam melakukan evaluasi kinerja program, serta mengambil tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan dari rencana anggaran. Fungsi monitoring ini juga berperan penting dalam proses pengambilan keputusan berbasis data aktual.

4.2.8 Penyusunan dan Pencetakan Laporan Keuangan

Tahapan akhir dalam penggunaan aplikasi ini adalah penyusunan dan pencetakan laporan keuangan, termasuk laporan evaluasi kinerja yang dihasilkan langsung dari sistem. Laporan yang tercetak menjadi dokumen resmi yang disampaikan kepada pimpinan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Selain itu, laporan ini juga digunakan oleh Inspektorat sebagai dasar dalam melakukan pengawasan dan audit internal, untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan telah berjalan secara transparan, efisien, dan akuntabel.

Berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi EPRA, sistem secara otomatis menghasilkan laporan keuangan yang mencakup informasi pagu, realisasi keuangan, persentase capaian, serta target dan realisasi fisik. Berikut adalah laporan keuangan semester I tahun 2025 yang dihasilkan aplikasi EPRA:

Tabel 4. 1 Laporan Keuangan yang dihasilkan Menggunakan Aplikasi EPRA

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	% Realisasi	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)
1.	Pengawasan Rutin OPD	5.500.000.000	1.800.000.000	32,73%	50%	60%
2.	Audit Kinerja	3.200.000.000	1.100.000.000	34,38%	45%	58%
3.	Pemeriksaan Kasus Khusus	2.500.000.000	750.000.000	30,00%	40%	55%
4.	Sosialisasi dan Pelatihan Pengawasan	1.800.000.000	600.000.000	33,33%	50%	62%
5.	Operasional dan Dukungan	7.669.053.941	2.260.000.000	29,47%	55%	61%

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	% Realisasi	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)
	Administratif					
6.	Total	20.669.053.941	6.510.000.000	31,50%	50%	60%

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Manado, 2025

4.2.9 Evaluasi Penggunaan Aplikasi EPRA

Berdasarkan hasil evaluasi penggunaan sistem sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 4.1 dibawah, sebagian besar aspek teknis telah berjalan sesuai prosedur. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pelaksanaan aplikasi EPRA telah difungsikan dengan benar.

Namun demikian, temuan dari Tabel 4.2 mengungkap bahwa masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan aplikasi di lapangan. Kendala-kendala tersebut berdampak pada kelancaran pelaporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya perbaikan berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, pembenahan infrastruktur pendukung, serta pengawasan rutin untuk memastikan bahwa sistem berjalan optimal sesuai tujuan awal penerapannya.

Berikut beberapa aspek evaluasi penggunaan aplikasi EPRA yang sudah sesuai:

Tabel 4. 2 Aspek Evaluasi Penggunaan Sudah Sesuai

No.	Aspek Evaluasi	Sub-Komponen	Status Kesesuaian	Keterangan
1.	Penunjukan Tim Pengelola Keuangan	a. Operator Keuangan	Sesuai	Telah ditunjukan sesuai Surat Tugas (ST) dan aktif dalam penginputan data ke aplikasi.
		b. Pejabat Penanggung Jawab (Kasubbag Perencanaan/ Keuangan)	Sesuai	Bertanggung jawab atas verifikasi dan konsistensi data anggaran yang diinput.

		c. Kepala Bidang/Kegiatan	Sesuai	Terlibat dalam monitoring realisasi dan laporan kegiatan.
2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran	a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Sesuai	Dokumen tersedia dan menjadi referensi utama input data ke aplikasi EPRA.
		b. Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)	Sesuai	Digunakan sebagai dasar pelaksanaan dan perencanaan kegiatan tahunan.
		c. Rencana Anggaran Kas (RAK)	Sesuai	Telah disusun dan digunakan sebagai acuan jadwal penarikan dana.
		d. Target Fisik dan keuangan	Sesuai	Telah ditetapkan sebagai bagian dari perencanaan kinerja perangkat daerah.
3.	Ketersediaan Fasilitas dan Akses Sistem	a. Akses Login bagi Pengguna Resmi	Sesuai	Akun telah diberikan kepada pengguna yang berwenang di masing-masing bidang.
		b. Password dan Hak Akses	Sesuai	Pengaturan hak akses sudah disesuaikan dengan tanggung jawab jabatan.

Sumber: Data Olahan, 2025

Berikut beberapa aspek evaluasi penggunaan aplikasi EPRA yang belum sesuai:

Tabel 4. 3 Aspek Evaluasi Penggunaan Belum Sesuai

No.	Aspek Evaluasi	Sub-Komponen	Status Kesesuaian	Keterangan
1.	Koordinasi Antar Unit Kerja	a. Penyesuaian Jadwal Pelaporan	Belum Sesuai	Masih ditemukan ketidaksesuaian jadwal antar bidang, menyebabkan keterlambatan input.
		b. Rekonsiliasi Data Kegiatan dan Anggaran	Belum Sesuai	Belum dilakukan secara berkala, menyebabkan potensi ketidaksesuaian data.
		c. Penyerahan Target dan Realisasi Bulanan	Belum Sesuai	Tidak semua bidang menyerahkan laporan tepat waktu secara rutin.
2.	Ketersediaan Fasilitas dan Akses Sistem	a. Ketersediaan Komputer dan Internet	Belum Sesuai	Beberapa perangkat belum memadai dan jaringan internet kurang stabil.

Sumber: Data Olahan, 2025

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado, implementasi aplikasi EPRA memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan efektivitas dalam proses penyusunan laporan keuangan. Setiap tahapan dalam sistem ini, mulai dari proses awal hingga akhir, telah berhasil menyederhanakan alur kerja yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi lebih sistematis dan berbasis digital.

Langkah awal dalam penggunaan aplikasi EPRA dimulai dengan proses verifikasi atau login ke dalam sistem. Setiap pengguna yang memiliki hak akses, seperti operator maupun staf keuangan, wajib masuk dengan akun masing-masing yang telah terdaftar. Sistem ini dirancang untuk menjaga keamanan data keuangan dan memastikan bahwa hanya pegawai yang berwenang yang dapat mengakses dan memproses informasi anggaran.

Tahapan selanjutnya adalah pengisian data pagu anggaran, yang menjadi acuan utama dalam proses perencanaan dan pelaporan keuangan. Dalam konteks penelitian ini, diketahui bahwa total pagu anggaran untuk tahun berjalan hingga bulan Juni 2025 adalah sebesar Rp20.669.053.941. Input data ini dilakukan secara berurutan dan sistematis yang telah disediakan dalam aplikasi, sehingga memudahkan pelacakan serta pengawasan terhadap realisasi anggaran.

Berikutnya, aplikasi EPRA juga memfasilitasi proses pencatatan realisasi fisik dan keuangan. Fitur ini berguna dalam memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan serta penggunaan anggaran yang telah direncanakan. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa capaian fisik mencapai 60%, sementara realisasi keuangan baru berada pada angka 31,5% atau sekitar Rp6,51 miliar. Selisih antara progres fisik dan penyerapan anggaran ini menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian yang perlu dianalisis lebih lanjut agar tidak menghambat pelaporan.

Selanjutnya, pengguna juga diminta untuk mengisi data target fisik dan keuangan, yang berguna sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja secara bulanan. Dalam enam bulan pertama tahun 2025, terlihat bahwa target realisasi keuangan meningkat secara bertahap dari 4,83% di bulan Januari hingga mencapai 59,54% pada bulan Juni. Data ini mencerminkan keadaan kegiatan yang meningkat menjelang pertengahan tahun dan menegaskan pentingnya perencanaan target yang akurat dan realistis.

Adapun proses terakhir dalam input data adalah penyusunan Rencana Realisasi Anggaran Kas (RAK), yang menunjukkan kebutuhan kas aktual setiap bulan. Dalam implementasinya, realisasi RAK pada bulan Januari tercatat tinggi yaitu sebesar 83,23%, namun mengalami penurunan drastis menjadi hanya 32,79% pada bulan Mei. Ini menunjukkan adanya tantangan dalam aspek penyerapan

anggaran atau hambatan operasional yang memerlukan perhatian dan evaluasi dari pihak manajemen.

Setelah seluruh data diinput ke dalam sistem, aplikasi EPRA mewajibkan proses verifikasi dan validasi oleh pejabat terkait, seperti Kepala Sub Bagian Perencanaan atau Keuangan. Tujuannya adalah memastikan data yang diinput sesuai dengan dokumen resmi seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan laporan kegiatan. Verifikasi ini penting untuk menjamin validasi data, sementara validasi mencegah duplikasi atau kesalahan input, sehingga akurasi dan integritas laporan keuangan tetap terjaga.

Setelah data dinyatakan valid, aplikasi EPRA memungkinkan proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara real-time. Melalui dashboard, setiap unit kerja dapat memantau capaian anggaran dan kegiatan berdasarkan data terkini. Hal ini memudahkan pimpinan untuk mengevaluasi kinerja secara objektif dan mengambil keputusan cepat jika ditemukan kendala di lapangan.

Tahap akhir penggunaan aplikasi EPRA adalah penyusunan dan pencetakan laporan keuangan secara otomatis. Laporan ini mencakup data pagu, target, realisasi fisik dan keuangan, serta perbandingan antara rencana dan pelaksanaan. Hasil laporan dapat langsung dicetak sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan atau untuk keperluan audit, sehingga proses pelaporan menjadi lebih efisien dan akuntabel.

Secara keseluruhan, penerapan aplikasi EPRA di Inspektorat Daerah Kota Manado cukup efektif dalam mendukung pelaporan keuangan yang transparan dan tepat waktu. Sistem ini mampu mengintegrasikan proses input hingga pelaporan akhir secara terstruktur. Namun, evaluasi rutin tetap dibutuhkan untuk mengatasi kendala seperti selisih antara target dan realisasi, serta ketidakteraturan kebutuhan kas. Perbaikan berkelanjutan penting untuk menjaga kinerja sistem tetap optimal.

Selain dari hasil observasi terhadap penggunaan fitur-fitur aplikasi EPRA, analisis terhadap kesesuaian penerapan aplikasi ini juga diperkuat melalui data yang ditampilkan dalam Tabel 4.1 dan Tabel 4.2.

Pada Tabel 4.1, ditunjukkan bahwa sebagian besar aspek penggunaan aplikasi EPRA di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado telah berjalan sesuai. Hal ini mencakup penunjukan tim pengelola keuangan yang telah dilakukan secara formal

melalui surat tugas, kejelasan peran operator dalam input data, serta keterlibatan kepala bidang dalam proses monitoring dan evaluasi. Selain itu, dokumen perencanaan seperti DPA, RKA, dan RAK juga telah tersedia dan dijadikan acuan utama dalam pengisian data ke dalam sistem. Aspek teknis lain seperti akses login dan pengaturan hak akses juga telah dilakukan sesuai ketentuan, sehingga menjamin keamanan dan otorisasi pengguna yang tepat.

Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya sesuai sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.2. Salah satu kendala utama adalah ketidaksesuaian jadwal pelaporan antar bidang, yang mengakibatkan keterlambatan dalam proses input data. Selain itu, koordinasi antar unit kerja dalam hal rekonsiliasi data kegiatan dan anggaran masih belum dilakukan secara rutin, sehingga menimbulkan potensi ketidaksesuaian informasi yang dilaporkan. Keterlambatan dalam penyerahan target dan realisasi bulanan oleh beberapa bidang juga menjadi hambatan dalam proses pelaporan yang tepat waktu. Di sisi infrastruktur, masih terdapat kekurangan pada ketersediaan perangkat komputer dan kestabilan jaringan internet, yang turut mempengaruhi kelancaran operasional aplikasi.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun penerapan aplikasi EPRA telah membawa kemajuan dalam digitalisasi pelaporan keuangan, tetap diperlukan penguatan di aspek koordinasi antar unit dan infrastruktur pendukung. Evaluasi rutin serta peningkatan kapasitas pengguna juga menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas sistem secara menyeluruh.

Permasalahan yang ditemukan dalam penerapan aplikasi EPRA di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado tidak terlepas dari beberapa penyebab mendasar yang telah diuraikan pada bagian latar belakang. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya koordinasi antar unit kerja, yang berdampak langsung pada keterlambatan input data dan tidak sinkronnya pelaporan antarbidang. Selain itu, minimnya pemahaman teknis dari sebagian pegawai terhadap fitur dan mekanisme kerja aplikasi EPRA turut memperlambat proses verifikasi dan validasi data. Keterbatasan infrastruktur, seperti perangkat komputer dan koneksi internet yang belum merata, juga menjadi hambatan teknis yang menyebabkan ketidakteraturan dalam penginputan dan akses aplikasi.

Masalah-masalah ini secara keseluruhan berkaitan erat dengan efektivitas dan efisiensi penyusunan laporan keuangan. Meskipun sistem EPRA telah dirancang dengan fitur yang cukup memadai untuk mendukung pelaporan berbasis data aktual dan real-time, faktor sumber daya manusia dan dukungan teknis masih menjadi tantangan yang harus dibenahi.

Melalui pembahasan ini, diketahui bahwa penyebab masalah bukan terletak pada aplikasi itu sendiri, tetapi pada implementasi dan kesiapan operasional internal. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan yang menyeluruh bagi operator dan penguatan komunikasi lintas bidang untuk memperlancar proses kerja. Selain itu, peningkatan sarana pendukung juga menjadi rekomendasi penting agar aplikasi dapat berfungsi secara maksimal.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan Aplikasi EPRA di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan aplikasi EPRA di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado telah berjalan cukup efektif dalam mendukung proses pelaporan keuangan yang terstruktur, real-time, dan transparan. Fitur-fitur seperti input anggaran, target, realisasi, validasi data, serta penyusunan laporan otomatis memberikan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas keuangan.
2. Masih terdapat beberapa kendala teknis dan administratif dalam pelaksanaannya, seperti keterlambatan penginputan data dari beberapa bidang, koordinasi yang belum optimal antar unit kerja, keterbatasan perangkat dan jaringan internet, serta kurangnya pemahaman pegawai terhadap penggunaan aplikasi.
3. Penyebab utama permasalahan bukan terletak pada sistem, melainkan pada kesiapan operasional internal, termasuk sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya fungsi aplikasi dalam menghasilkan laporan tepat waktu dan akurat.
4. Penerapan EPRA tetap memberikan dampak positif, khususnya dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengawasan anggaran, meskipun masih membutuhkan perbaikan berkelanjutan agar pemanfaatannya lebih optimal.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan pada hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat membangun untuk meningkatkan penerapan aplikasi EPRA di lingkungan Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pelatihan teknis secara berkala bagi seluruh operator dan pegawai yang terlibat dalam penggunaan aplikasi EPRA, agar pemahaman terhadap sistem meningkat dan kesalahan input dapat diminimalkan.

2. Diperlukan peningkatan fasilitas pendukung seperti komputer, jaringan internet, dan perangkat lunak yang stabil, agar semua proses dapat berjalan lancar tanpa hambatan teknis.
3. Koordinasi lintas bidang harus diperkuat, terutama dalam penyampaian target dan laporan realisasi, agar proses verifikasi, validasi, dan pelaporan dapat dilakukan tepat waktu dan sesuai standar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Alamsyah, M. R., & Kurniawan, B. (2021). *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Ekonomi & Akuntansi*, 23(1), 112–120.
- Alrahim, A. A., & Wibowo, P. (2022). Analisis manfaat laporan keuangan berbasis Akrua dalam pengambilan keputusan di Pemerintah Kabupaten Bantaeng. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 7(3), 80–93. <https://doi.org/10.29407/jae.v7i3.18579>.
- Goni, I. S., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2020). Transparansi Pengelolaan Anggaran Melalui Aplikasi Web Cerdas Epra Online (Ceo) Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 2(5), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/31424%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/download/31424/30083>.
- Korompis, S., Tuerah, R., Tangon, J., & Malonda, D. (2021). Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Emkm (Studi Kasus Usaha Peternakan Ayam Petelur Di Desa Watumea Kecamatan Eris). *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 4(2), 75–82. <https://doi.org/10.34128/jra.v4i2.95>.
- Natalia Mamengko, D. (2022). Pelaporan Realisasi Anggaran Pada Aplikasi Epra (Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran) Di Kabupaten Minahasa. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 63–70. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.497>.
- Prihatin, K. S., & Anjani, S. (2021). Analisis Pengukuran Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah Dengan Menggunakan Metode Camel Pada PT. Bank Mandiri Syariah Tbk. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 17–37. <https://doi.org/10.47080/progress.v4i1.1124>.
- Siahaan, S. B., & Simanjuntak, A. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi

Keuangan Daerah, Pemahaman Standar akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu). *Jurnal Manajemen*, 6(2), 129–138.

Sumanti, A. O., Sondakh, J. J., & Kapojos, P. M. (2022). Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado Analysis of Regional Financial Statement Presentation Based on Government Accounting Standards at the Manado City. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (EKonomi, Sosial, Budaya Dan Hukum)*, 5(2), 381–388.

Susanto, A. (2020). *Sistem Informasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Lingga Jaya.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara

Pertanyaan Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara bersama pegawai yang ada di kantor Inspektorat Daerah Kota Manado, informasi yang didapatkan sebagai berikut:

Hari, Tanggal : Senin, 16 Juni 2025
Tempat : Dikantor Inspektorat Daerah Kota Manado
Nama : Kurnia Multia Lestari Pua, SE
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yaitu:

1. Apakah penerapan aplikasi EPRA di kantor Inspektorat Daerah Kota Manado dalam penyusunan laporan keuangan sudah efektif?

Jawab: Aplikasi EPRA dinilai membantu proses penyusunan laporan keuangan, namun efektivitasnya belum maksimal karena keterbatasan pemahaman pengguna terhadap fitur-fitur tertentu.

2. Apakah ada kendala pada saat penggunaan aplikasi EPRA dalam penyusunan laporan keuangan di kantor Inspektorat Daerah Kota Manado?

Jawab: Terdapat kendala teknis (akses lambat) dan non-teknis (kurangnya pelatihan dan pemahaman operator).

3. Apakah aplikasi EPRA membantu pegawai dalam proses penyusunan anggaran?

Jawab: Aplikasi EPRA mempermudah dalam penyusunan dan penyesuaian anggaran, terutama dalam pelaporan realisasi.

4. Apakah pengguna aplikasi EPRA dapat membandingkan antara rencana anggaran dan realisasi secara langsung dalam sistem?

Jawab: Fitur perbandingan sudah tersedia dan dimanfaatkan, namun tidak semua pegawai memahami cara membacanya.

5. Apakah pegawai mendapatkan notifikasi atau panduan pada saat terjadi ketidaksesuaian dalam pengisian anggaran di aplikasi EPRA?

Jawab: Sistem memberikan notifikasi jika terjadi kesalahan input, tapi belum semua pengguna memanfaatkan panduan tersebut.

6. Apakah bisa dijelaskan secara umum dan sistematis alur kerja dari awal sampai akhir dalam aplikasi epra?

Jawab: Alur kerja aplikasi EPRA dimulai dari input data anggaran hingga finalisasi laporan secara digital.

7. Apakah penggunaan aplikasi EPRA berdampak terhadap efisiensi dan efektivitas kerja?

Jawab: Aplikasi EPRA membantu mempercepat pelaporan dan mengurangi kesalahan manual, meskipun proses koordinasi masih perlu ditingkatkan.

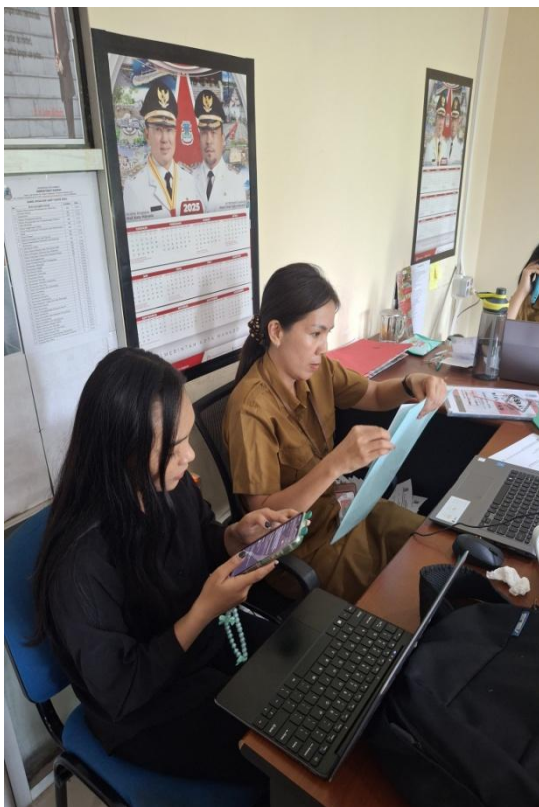
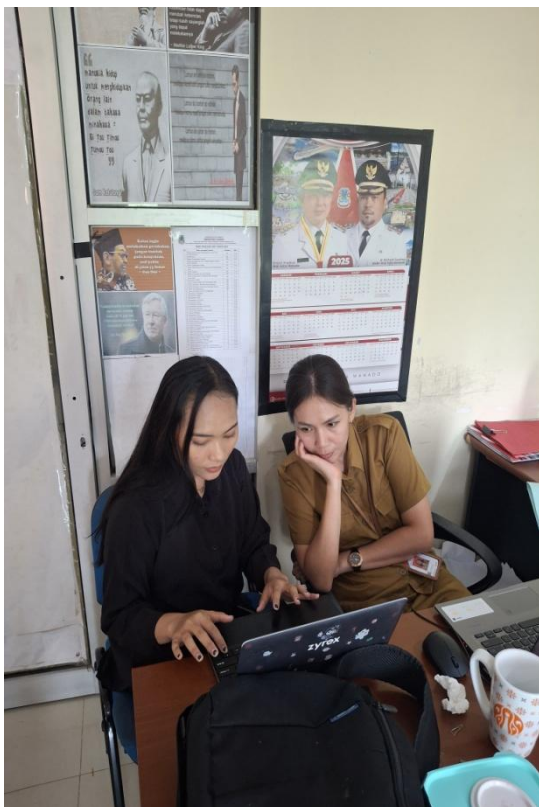
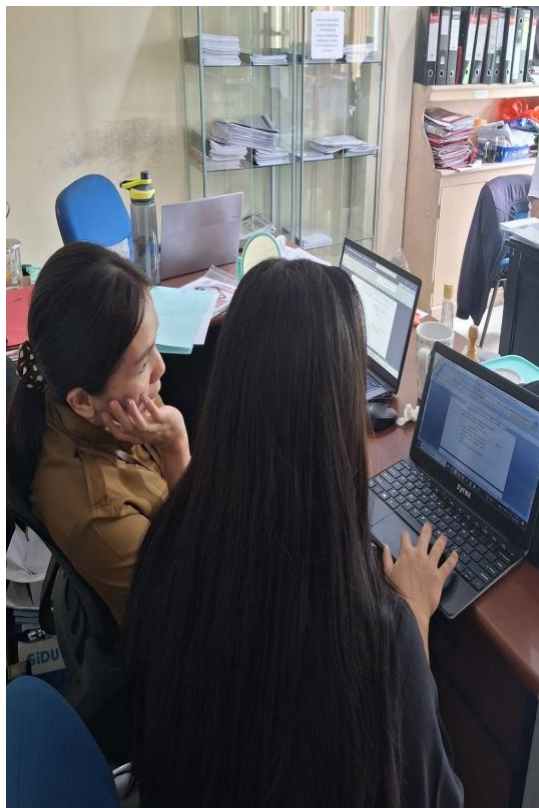
8. Apakah aplikasi epra membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan?

Jawab: Aplikasi EPRA dinilai meningkatkan transparansi pelaporan, meskipun keterbukaan antar unit masih terbatas.

9. Apakah aplikasi epra mempengaruhi kualitas laporan keuangan?

Jawab: Aplikasi EPRA berdampak positif terhadap kecepatan dan kelengkapan laporan, tetapi akurasi masih tergantung pada SDM yang menginput data.

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara





PEMERINTAH PEMERINTAH KOTA MANADO
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Pameran Lingkungan V Kelurahan Kairagi II Kecamatan Mapanget 95254
<https://inspektorat.manadokota.go.id>; e-mail: inspektoratmanadokota@gmail.com

Manado, 13 Juni 2025

Nomor : 700.03/INSP/789 /VI/2025
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Permohonan Data

Kepada Yth.

Direktur Politeknik Negeri Manado

c.q. Ketua Jurusan Akuntansi

di -

Tempat

Menindaklanjuti surat dari Plt. Ketua Jurusan Akuntansi Nomor 873/PL12.6/AK/2025 Tanggal 13 Juni 2025 tentang Permohonan Data, maka bersama ini kami menyetujui untuk memberikan data yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan proposal dan skripsi dengan judul penelitian "Analisis Penerapan Aplikasi EPRA dalam Penyusunan Laporan Keuangan" oleh Mahasiswa a.n. Angelica F. Lalendim, NIM. 21043123.

Demikian disampaikan, atasnya diucapkan terima kasih.

Kepala Sub Bagian
Administrasi dan Umum,

Claudia Lita Grace Hadyiswanto, S.E., MBA
NIP. 19870812 201903 2 002

Lampiran 4 Surat Keterangan Cek Plagiarisme



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Politeknik Negeri Manado
Jurusan Akuntansi
Jl. Raya Politeknik, Buha, Kec. Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara

Surat Keterangan Cek Turnitin Skripsi/TA Mahasiswa

NO. 048/AK/PL/2025

Sehubungan dengan persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi, menerangkan bahwa nama berikut adalah mahasiswa yang telah diuji plagiarisme Skripsi/Tugas Akhir melalui fasilitas *software* "Turnitin".

Nama	:	Angelica F Lalendim
NIM	:	21043132
Program Studi	:	Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi/TA	:	Analisis Penerapan Aplikasi EPRA (Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado
Pembimbing Utama	:	Raykes Hinrich Tuerah, SE.,MSA
Persentase	:	22%
Tanggal Pengecekan	:	10 Juli 2025

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Manado , 10 Juli 2025
Operator Cek Plagiasi

Dominikus Andreo Maryadi, M.Ak
NIP. 199609102024061001

**Catatan: lampirkan hasil cek plagiat*

 POLITEKNIK NEGERI MANADO 					
FORMULIR	FM-098 ed.A rev.1	ISSUE: A	Issued: 08-08-2011	UPDATE: 1	Updated: 30-05-2012

LEMBAR ASISTENSI REVISI SKRIPSI

Nama : Angelica F Lalendim
 Jurusan : Akuntansi
 NIM : 21043132
 Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan
 Judul : Analisis Penerapan Aplikasi EPRA (Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado
 Ketua Penguji : Jacqueline Greety Wenas, SE.,MSA

NO	TANGGAL	URAIAN	PARAF DOSEN
	17 Juli 2015	Revisi sistematika penulisan dan luh plagiarisme. Revisi latar belakang: Tujuan akan disederhanakan perbandingannya. Revisi Bab II: tampilkan format lap. keuangan sesuai yg berlaku, referensi harus yg terbaru, flowchart & deskripsi masuk ke poin 2.3. dll. Revisi Bab III: wawancara & observasi. Revisi Bab IV: tampilkan lap. keuangan menggunakan EPRA.	   

Manado, 22 Juli 2015
Ketua Penguji,


Jacqueline Greety Wenas, SE.,MSA
 NIP. 196904072008122001

 POLITEKNIK NEGERI MANADO 					
FORMULIR	FM-098 ed.A rev.1	ISSUE: A	Issued: 08-08-2011	UPDATE: 1	Updated: 30-05-2012

LEMBAR ASISTENSI REVISI SKRIPSI

Nama : Angelica F Lalendim
 Jurusan : Akuntansi
 NIM : 21043132
 Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan
 Judul : Analisis Penerapan Aplikasi EPRA (Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado
 Anggota Penguji 1 : Fanesa I.M. Syaefudin, M.Acc

NO	TANGGAL	URAIAN	PARAF DOSEN
1.	17 Juli 2025	Revisi perbedaan penelitian ini dan Penelitian yg dilakukan oleh (Gohi, 2022). Revisi latar belakang masalah untuk mengubah pengantar mengenai pada pentingnya laporan keuangan dan LRA. Revisi Revisi tujuan penelitian. - Manfaat penelitian. Revisi pada Bab 2. Revisi Revisi Revisi 5 dan terakhir. Revisi tambahkan kelebihan ini dengan penelitian terdahulu.	    

Manado, 18 Juli 2025
Penguji 1,



Fanesa I.M. Syaefudin, M.Acc
NIP. 199403152022032013

 POLITEKNIK NEGERI MANADO 					
FORMULIR	FM-098 ed.A rev.1	ISSUE: A	Issued: 08-08-2011	UPDATE: 1	Updated: 30-05-2012

LEMBAR ASISTENSI REVISI SKRIPSI

Nama : Angelica F Lalendim
 Jurusan : Akuntansi
 NIM : 21043132
 Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan
 Judul : Analisis Penerapan Aplikasi EPRA (Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Di Kantor Inspektorat Daerah Kota Manado
 Anggota Penguji 2 : Deisy Lusiana, SE.,MSi

NO	TANGGAL	URAIAN	PARAF DOSEN
1.	17 Juli 2025	Revisi pada kata pengantar bisa dikurangi yg tidak perlu dan tambahkan yg perlu dimasukkan sesuai template. Revisi pada abstrak, kata kunci diubah : analisis, aplikasi EPRA, laporan keuangan (dari Indonesia-Unggah) Revisi pada Bab I, pada tujuan penelitian : Harus konsisten dari rumusan masalah. Revisi koreksi pengetikan yang salah. Revisi pada Daftar Pustaka disusun menurut abjad. Judul tidak diketik huruf besar semua, hanya PL setiap bab S db,	    

Manado, 22 Juli 2025

Penguji 2,



Deisy Lusiana, SE.,MSi

NIP. 197003052003122001